



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**

LAPORAN KINERJA 2024



SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

KATA PENGANTAR

” Segala Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan dan menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol disusun sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR No 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

APRI ARTOTO, S.T., M.P.P.M

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan implementasi akuntabilitas Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol atas kinerja dan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun 2024 dan sesuai tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020-2024. Di dalamnya terdapat gambaran mengenai target kinerja, pencapaian yang telah dicapai, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan, termasuk juga kinerja anggaran, kaleidoskop kegiatan, dan prestasi lainnya yang berhasil diraih sepanjang tahun 2024. Adapun penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja serta DIPA Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2024.

Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2024 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 17 Januari 2025

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,



Apri Artoto, S.T., M.P.P.M
NIP. 19690425 199603 1 001

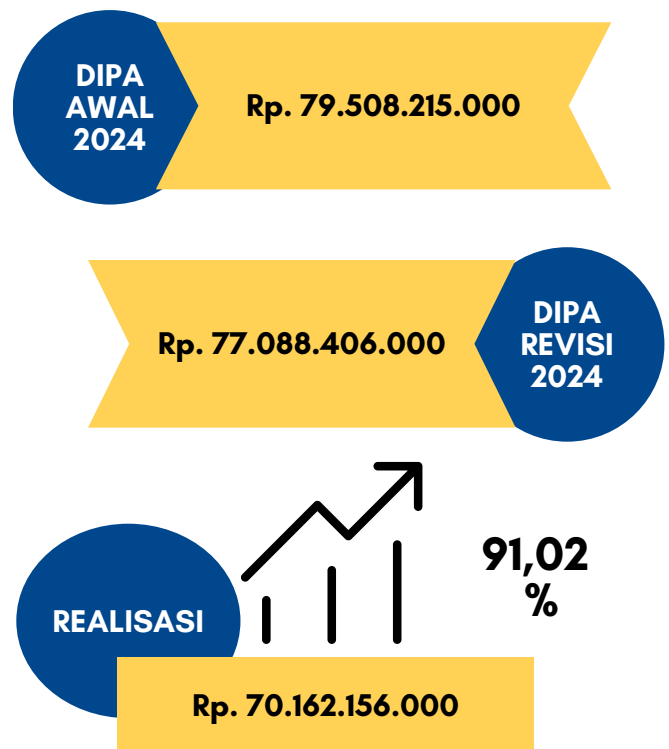
RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar; meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, melaksanakan sasaran strategis "meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional", dengan sasaran program "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional" dan sasaran kegiatan "Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol". Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Capaian Kinerja



Capaian Keuangan



Capaian Kinerja keuangan menurun dari tahun sebelumnya yaitu **91,96%**



Kendala yang Dihadapi



- Implementasi Sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) saat ini masih tertunda dan mundur dari jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini utamanya karena beberapa kondisi seperti kesiapan sistem, persetujuan/perizinan dari instansi terkait, serta kesiapan data registrasi dan identifikasi kendaraan milik Kepolisian. Saat ini BPJT sedang melaksanakan negosiasi bersama dengan PT RITS untuk dapat mempersiapkan implementasi Sistem MLFF termasuk dengan modifikasi yang perlu dilakukan. Di samping itu, juga mempersiapkan risiko yang mungkin muncul dari setiap skenario yang mungkin ditempuh oleh Pemerintah.
- Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan.



Upaya Peningkatan Kinerja



- Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan – pelatihan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal.
- Koordinasi dengan pihak – pihak luar terkait tindak lanjut permasalahan pembebasan lahan.
- Meningkatkan koordinasi internal antar Sekretariat BPJT dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan lebih selaras.
- Menyusun perencanaan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dengan target kinerja yang lebih matang sehingga tidak terlalu banyak revisi yang perlu dilakukan.
- Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Keberhasilan



- Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah mengoperasikan Ruas Jalan Tol baru yang dioperasikan di Tahun 2024 adalah 184,73 km sebanyak 13 ruas.
- Sejak 1978 hingga saat ini, telah terdapat 75 ruas jalan tol yang beroperasi dengan panjang jalan tol sampai dengan Desember 2024 adalah 3020,491 Km.
- Pelelangan perusahaan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis dan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi telah dilaksanakan pada tahap prakualifikasi.
- Capaian nilai investasi kinerja pengembangan jalan tol sampai dengan desember 2024 adalah sebesar Rp.767,69 Triliun.
- Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penyiapan dukungan penyusunan tarif awal sebanyak 17 (tujuh belas) ruas Jalan Tol, penyiapan dukungan penyusunan tarif reguler sebanyak 10 (sepuluh) ruas Jalan Tol dan penyiapan dukungan penyusunan tarif reguler sebanyak 16 (enam belas) ruas Jalan Tol.
- Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pembuatan leger jalan tol melalui pendampingan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan sebanyak 41 Ruas Jalan Tol.
- Selama tahun 2024 telah dilaksanakan serah terima dan serah kelola aset jalan tol sebanyak 7 aset jalan tol.



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Tugas dan Fungsi	13
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	16
1.3.1 Struktur Organisasi.....	16
1.3.2 Sumber Daya Manusia	17
1.4 Sarana Prasarana	21
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik.....	21
1.4.2 Teknologi Informasi.....	25
1.5 Isu Strategis.....	32
1.6 Sistematika Laporan	35
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	37
2.1 Uraian Singkat Renstra/ Dokumen Perencanaan.....	37
2.1.1 Visi dan Misi	40
2.1.2 Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis.....	41
2.1.3 Program dan Kegiatan.....	43
2.2 Perjanjian Kinerja	43
2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal.....	46
2.2.2 Perjanjian Kinerja Revisi.....	47
2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	48
2.2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Outcome)	48
2.2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Output)	49
2.3 Metode Pengukuran.....	49
2.3.1 Metode Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja.....	49
2.4 Target Kinerja Tahun Berjalan Menurut Renstra.....	51
2.4.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024.....	51
2.4.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 52	

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas	52
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	54
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program.....	54
3.2.2 Capaian Indikator Kinerja Output.....	56
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Unit Kerja.....	106
3.3.1 Perbandingan Capaian IKSP dengan Instansi Lain.....	109
3.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	109
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	109
3.4.2 Realisasi Anggaran TA. 2024.....	113
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dengan Tahun sebelumnya.....	113
3.4.4 Isu Terkait Program dan Anggaran TA. 2024.....	114
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	114
3.6 Pemanfaatan Laporan Kinerja	116
3.7 Paket Diresmikan dan Penghargaan.....	124
3.8 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Penggunaan Pelayanan Publik 126	
BAB 4 PENUTUP.....	128
4.1. Simpulan Umum.....	128
4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan.....	128
4.1.2 Faktor Pendukung Kegagalan	128
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1 Rincian Barang Milik Negara	23
Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN	38
Tabel 2.1.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol	40
Tabel 2.1.3 Program dan kegiatan.....	43
Tabel 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (outcome).....	48
Tabel 2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)	49
Tabel 2.3.1 Metode Pengukuran Outcome Capaian Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 2.3.2 Metode Pengukuran Output Capaian Kinerja Tahun 2024.....	50
Tabel 2.4.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)	51
Tabel 2.4.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)	52
Tabel 4.1.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP TA.2023	54
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2024.....	56
Tabel 3.2.2 Perbandingan Capaian Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)	58
Tabel 3.2.3 Capaian kinerja berdasarkan sub komponen	59
Tabel 3.2.4 Kegiatan Manajemen Bidang Ke Tata Usahaan.....	64
Tabel 3.2.5 Ruas Tol yang Belum Menyusun Dokumen Leger Jalan	71
Tabel 3.2.6 Ruas Tol yang Belum Menyusun Dokumen Leger Jalan	72
Tabel 3.2.7 Ruas Tol yang telah Serah Terima dan Kelola Aset.....	75
Tabel 3.2.8 Perubahan Rencana Usaha Jalan Tol	100
Tabel 3.2.9 Ruas Yang dilelang Pada Tahun 2024	101
Tabel 4.2.12 Tabel Nilai Investasi Pengusahaan Jalan Tol	101
Tabel 3.2.11 Capaian kinerja Output Layanan Umum	104
Tabel 3.2.12 Capaian kinerja Output Layanan Perkantoran	104
Tabel 3.2.13 Capaian kinerja Output Layanan Sarana Internal.....	105
Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020-2024.....	109
Tabel 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2024.....	109
Tabel 3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2024.....	110
Tabel 3.3.4 Perbandingan Capaian IKSP dengan Instansi Lain.....	111
Tabel 3.4.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2024	113
Tabel 3.4.2 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2024	115
Tabel 3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun sebelumnya	115
Tabel 3.5.1 Perbandingan Sumber Daya Manusia dan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 - 2024.....	117
Tabel 3.7.1 Data Jalan Tol yang diresmikan Tahun 2024.....	126
Tabel 3.8.1 Jumlah Nilai Rata – Rata Per Unsur dari Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol.....	17
Gambar 1.3.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2020 - 2024	18
Gambar 1.3.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.....	18
Gambar 1.3.4 Perbandingan Total Pegawai Berdasarkan Golongan.....	19
Gambar 1.3.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	19
Gambar 1.3.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	20
Gambar 1.3.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	21
Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2024.....	46
Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2024.....	46
Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2024.....	47
Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2024.....	47
Gambar 3.1.1 Hasil Penilaian SAKIP TA 2020 - 2023.....	55
Gambar 3.4.1 Kronologis DIPA Satker Sekretariat BPJT.....	112
Gambar 3.5.1 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024.....	117
Gambar 3.6.1 Kuesioner Pemanfaatan Laporan Kinerja	122
Gambar 3.6.2 Keterlibatan pimpinan dalam Lakin	123
Gambar 3.6.3 Kepedulian Pegawai dalam Lakin.....	123
Gambar 3.6.4 Penyesuaian Aktivitas.....	124
Gambar 3.6.5 Penyesuaian Anggaran.....	124
Gambar 3.6.6 Evaluasi Keberhasilan Kinerja	125
Gambar 3.6.7 Penyesuaian Perencanaan Kinerja.....	125
Gambar 3.6.8 Perubahan Budaya Kinerja.....	126
Gambar 3.8.1 SKM Penggunaan Layanan Publik.....	129

DAFTAR SINGKATAN

No	Daftar Singkatan	Keterangan
1	AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	ASN	Aparatur Sipil Negara
4	BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
5	BBPJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
6	BMN	Barang Milik Negara
7	BPJN	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
8	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
9	Dukman	Dukungan Manajemen
10	Duknis	Dukungan Teknis
11	IJD	Inpres Jalan Daerah
12	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
13	IKN	Ibu Kota Nusantara
14	IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
15	IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
16	IKU	Indikator Kinerja Utama
17	Inpres	Instruksi Presiden
18	IRI	International Roughness Index
19	KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
20	KI	Kawasan Industri
21	KPI	Key Performance Indicator
22	KRO	Klasifikasi Rincian Output
23	KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
24	LAKIN	Laporan Kinerja
25	LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
26	P2JN	Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional
27	PCI	Pavement Condition Index
28	PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
29	PJN	Pelaksanaan Jalan Nasional
30	PK	Perjanjian Kinerja
31	PKN	Pusat Kegiatan Nasional
32	PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
33	PN	Prioritas Nasional
34	PNS	Pegawai Negeri Sipil
35	POK	Petunjuk Operasional Kegiatan
36	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
37	PPNPN	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
38	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
39	Pro-PN	Proyek Prioritas Nasional
40	Rencum	Rencana Umum
41	Renstra	Rencana Strategis
42	RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
43	RO	Rincian Output
44	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

No	Daftar Singkatan	Keterangan
45	RPM	Rupiah Murni
46	RUNK	Rencana Umum Nasional Keselamatan
47	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
48	Satker	Satuan Kerja
49	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
50	SDM	Sumber Daya Manusia
51	SHT	Sisa Hasil Tender
52	SIPP	Sistem Informasi Pemantauan Proyek
53	SKPD-TP	Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan
54	SMKK	sistem manajemen keselamatan konstruksi
55	TA	Tahun Anggaran
56	Unker	Unit Kerja
57	Unor	Unit Organisasi
58	UPT	Unit Pelaksana Teknis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Pada tahun 2023, Permen PUPR No 43/PRT/M/2015 tentang BPJT dicabut dan diganti dengan Permen PUPR No 6 Tahun 2023. Terdapat perubahan yang signifikan di dalam peraturan tersebut baik dari struktur organisasi maupun dalam lingkup pekerjaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang BPJT mempunyai tugas melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi, Pengusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif kepada Menteri.

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan transportasi daerah tersebut.

Pembangunan jaringan jalan saat ini menjadi prioritas Pemerintah dalam agenda pembangunan tahun 2020 sampai 2024. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Indonesia. Rencana Strategi (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 47.017 km, jalan bebas hambatan (jalan tol) sepanjang 932,6 km (belum termasuk akses Makassar New Port sepanjang 3,25 km).

Target konektivitas jalan tersebut diwujudkan dengan pembangunan ruas - ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera sebagai *backbone*. Pembangunan jalan tol itu sendiri menghadapi dilema budget constraint dengan keterbatasan alokasi pembiayaan pemerintah untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Kerangka pembangunan dengan skema KPBU terus dikembangkan dan formulasi untuk pengembangan skema pembiayaan dalam kerjasama pemerintah dan swasta terus berevolusi demi semakin terbangunnya iklim investasi yang sehat dalam sektor jalan tol dan pengembangan infrastruktur secara umum.

Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerja sama dan koordinasi dengan lingkungan strategis di sekitarnya yang saling terkait untuk mempengaruhi pencapaian kinerja yang optimal. Lingkungan strategis internal dan eksternal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, meliputi:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
2. Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. Unit -unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
5. Pemerintah Daerah;
6. Kementerian Keuangan;
7. Kementerian Perhubungan;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Badan Usaha Jalan Tol;
10. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia;
11. Mitra Kerja Penyedia Jasa Konsultansi.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis operasional dan secara administratif kepada Badan Pengatur Jalan Tol yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol berdasarkan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Permen Nomor 15 Tahun 2005

tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Badan Pengatur Jalan Tol mengalami perubahan Nomenklatur Unit Kerja yang diikuti dengan berubahnya tugas dan fungsi dari BPJT tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, tugas BPJT adalah melakukan Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi Pengusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pengadaan investasi melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
- b. Merekomendasikan kepada Menteri untuk tarif awal dan penyesuaian;
- c. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak pengusahaan yang telah selesai masa konsesinya dan pengoperasian;
- d. Merekomendasikan kepada Menteri terkait pengambilalihan hak sementara pengusahaan yang gagal dalam pelaksanaan Konsesi, selanjutnya dilelangkan Kembali pengusahaannya; dan
- e. Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atas pelaksanaan kewajiban Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuknya Sekretariat BPJT yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan Secara administratif bertanggung jawab Kepada Menteri yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada BPJT dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan persiapan rekomendasi pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan pengusahaan Jalan Tol;
- c. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
- d. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengusahaan Jalan Tol;
- e. Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- f. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operas; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

1. Bidang Investasi Jalan Tol

Bidang Investasi Jalan Tol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi, pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari BUJT, pengusulan rencana usaha dan perubahannya, penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, pengawasan perusahaan Jalan Tol, serta rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi Jalan Tol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi;
- b. Penyusunan dukungan pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari BUJT;
- c. Penyiapan dukungan pengusulan rencana usaha dan perubahannya;
- d. Penyiapan dukungan penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen;
- e. Penyiapan dukungan pengawasan perusahaan Jalan Tol; dan
- f. Penyusunan analisis rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

2. Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset

Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas memberikan dukungan penyusunan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, pengawasan pemenuhan layanan, pengawasan sistem pengumpulan Tol, pengawasan penataan aset, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pemantauan Pemeliharaan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian;
- b. Penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
- c. Penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol; dan
- d. Penyiapan dukungan pengawasan penataan aset, dan pengelolaan PNBP perusahaan Jalan Tol.

3. Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol

Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol dan pemantauan operasi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Jalan Tol, serta pengembangan sistem informasi layanan Jalan Tol; dan

- b. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang BPJT mempunyai tugas melakukan Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi, Pengusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri, secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif kepada Menteri.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan dua orang Anggota. Kepala BPJT adalah Pejabat Kementerian PUPR sebagai wakil unsur pemerintah, sedangkan dua orang Anggota BPJT masing-masing adalah seorang dari unsur pemangku kepentingan (Wakil akademisi) dan dari unsur masyarakat (Wakil dari Pengguna Jalan Tol)

Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian PUPR sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

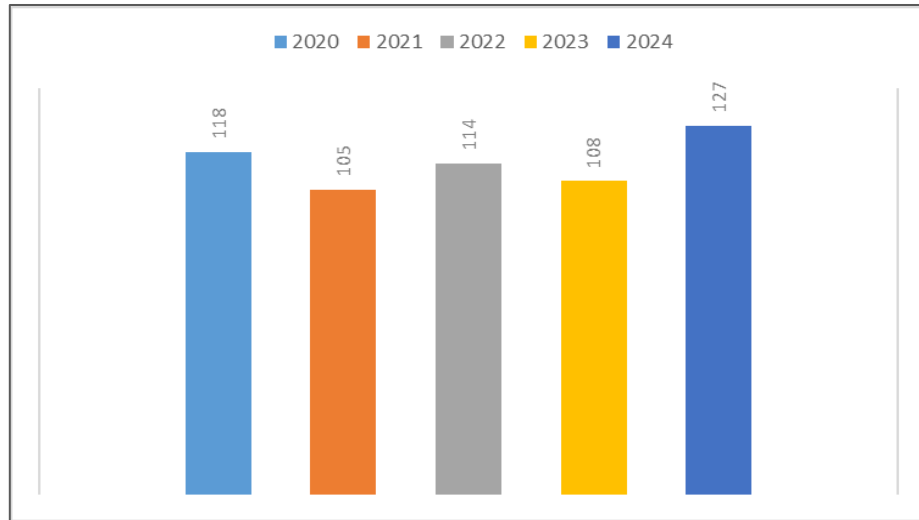
Struktur Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas: Bidang Investasi Jalan Tol, Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset, Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol sebagai staf Struktural Setingkat Eselon III dan Subbagian Tata Usaha. Sekretariat BPJT terdiri 1 (satu) Satuan kerja yang melaksanakan tugas fungsi kesatkeran yaitu Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.



Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 6 tahun 2023)

1.3.2 Sumber Daya Manusia

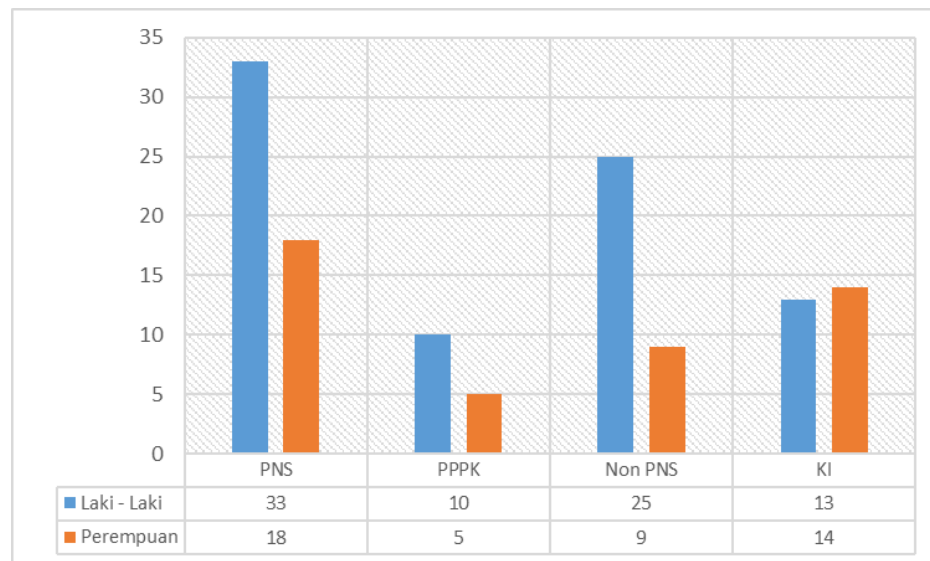
Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2024 ini didukung oleh 127 orang yang terdiri dari 51 orang PNS, 15 orang PPPK, 34 orang Non PNS dan 27 orang KI . Jumlah tersebut berubah (meningkat) jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan perubahan jumlah pegawai dengan total 108 orang. Perubahan tersebut disebabkan adanya pegawai mutasi dan promosi pegawai. Perbandingan total jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.3.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2020 - 2024

Rincian formasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, Usia, Pendidikan dan Jabatan yang dapat dilihat pada diagram/ grafik dibawah ini:

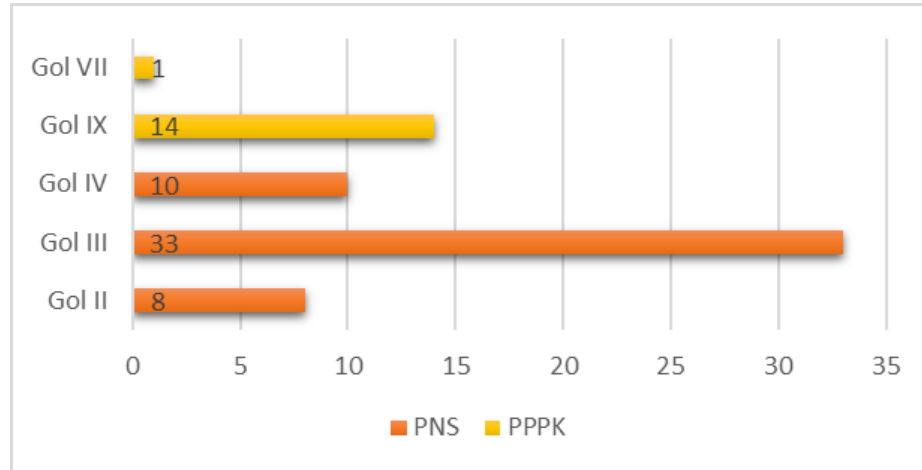
1. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.3.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol didominasi oleh pegawai laki – laki berjumlah 33 orang PNS, 10 orang PPPK, 25 orang Non PNS dan 13 orang Konsultan Individu sedangkan untuk perempuan 18 orang PNS, 5 orang PPPK, 9 orang Non PNS dan 14 orang Konsultan Individu.

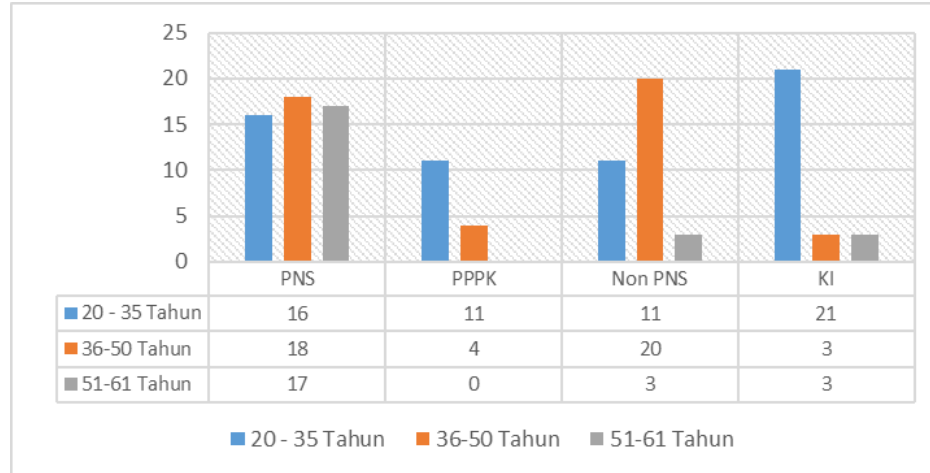
2. Berdasarkan Jenis Golongan



Gambar 1.3.4 Perbandingan Total Pegawai Berdasarkan Golongan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa PNS dengan golongan II sebanyak 8 orang sedangkan golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 33 orang dan untuk PPPK ada dua golongan yaitu golongan IX sebanyak 14 orang dan golongan VII sebanyak 1 orang.

3. Berdasarkan Usia

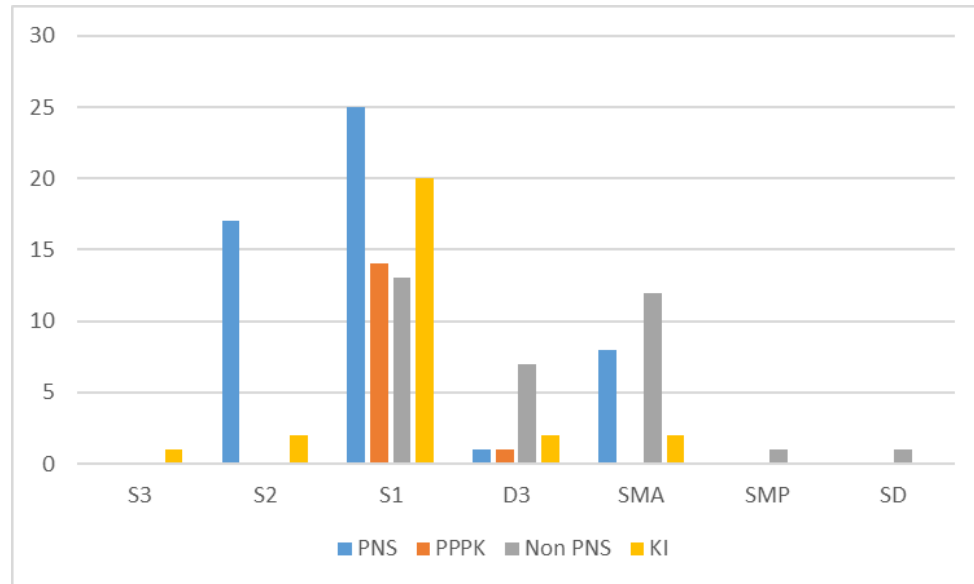


Gambar 1.3.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan rentang usia 20 – 35 tahun sebanyak 59 orang yang terdiri dari 16 orang PNS, 11 orang PPPK, 11 orang Non PNS dan 21 orang Konsultan Individu, untuk pegawai dengan rentang 36 – 50 tahun sebanyak 45 orang yang didominasi oleh Non PNS sebanyak 20 orang, kemudian PNS sebanyak 18 orang disusul PPPK sebanyak 4 orang dan 3 orang Konsultan Individu, sedangkan untuk pegawai dengan rentang 51 – 61 tahun sebanyak

23 orang yang didominasi oleh PNS sebanyak 17 orang, 3 orang untuk Non PNS dan Konsultan Individu.

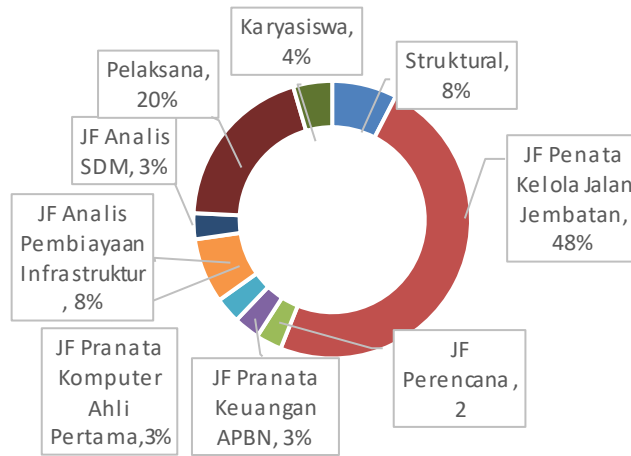
4. Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan tingkat Pendidikan didominasi oleh pegawai S1 sebanyak 25 orang PNS, 14 orang PPPK, 13 orang Non PNS, 20 orang Konsultan Individu, kemudian dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 17 orang PNS dan 1 orang Konsultan Individu, untuk SMA sebanyak 12 orang Non PNS, 8 orang PNS, 2 orang Konsultan Individu, dengan tingkat Pendidikan D3 sebanyak 7 orang Non PNS, 2 orang Konsultan Individu dan 1 orang PNS dan PPPK, dengan tingkat S3, SMP, SD masing – masing 1 orang, 1 orang Konsultan Individu untuk tingkat S3 dan 1 orang Non PNS untuk tingkat Pendidikan SMP dan terakhir 1 orang Non PNS untuk tingkat Pendidikan SD.

5. Berdasarkan Jabatan



5 orang (8%), Karyasiswa 3 orang (4%) dan Jabatan Fungsional Pranata masing – masing sebanyak 2 orang (3%).

Dari gambar disamping dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menduduki Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 32 orang (48%), diikuti Jabatan Fungsional Utama Pelaksana 13 orang (20%), kemudian Pejabat Struktural 5 orang (8%), Jafung Analis Pembiayaan Infrastruktur

Gambar 1.3.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

1.4 Sarana Prasarana

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah);

- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Perusahaan Perseroan, dan
 - 2) Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. **Tanah**
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. **Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. **Gedung dan Bangunan**
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- e. **Aset Tetap Lainnya**
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- f. **Konstruksi dalam Pengerjaan**
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sarana dan prasarana Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang tercatat dalam Barang Milik Negara dapat dilihat pada lampiran dokumen ini. Dan berikut tabel neraca aset tahunan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Tabel 1.4.1 Rincian Barang Milik Negara

No.	Nama Barang	Harga Perolehan	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Jeep	2,046,784,400	6	0	0
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	416,250,000	1	0	2
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2,426,612,000	10	1	0
4	Sepeda Motor	253,883,259	16	0	0
5	Lori Dorong	3,080,000	1	0	0
6	Tool Set	891,000	2	0	0
7	Alat Ukur Lainnya	377,696,000	3	0	0
8	Rak-Rak Penyimpan	5,940,000	1	0	0
9	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	11,190,000	3	0	0
10	Mesin Penghitung Uang	4,835,000	1	0	0
11	Lemari Besi/Metal	442,667,520	124	0	0
12	Lemari Kayu	53,698,600	7	0	0
13	Rak Besi	39,892,500	21	0	0
14	Rak Kayu	2,640,000	1	0	0
15	Filing Cabinet Besi	127,088,550	45	0	0
16	Filing Cabinet Kayu	7,546,000	4	0	0
17	Brandkas	76,610,000	5	0	0
18	Rotary Filling	14,300,000	1	0	0
19	Laci Box	1,210,000	1	0	0
20	Lemari Katalog	6,325,000	1	0	0
21	CCTV - Camera Control Television System	19,690,000	1	0	0
22	White Board	2,310,000	1	0	0
23	Copy Board/Elektric White Board	44,953,975	2	0	0
24	Alat Penghancur Kertas	29,095,000	7	0	0
25	Mesin Absensi	5,995,000	1	0	0
26	Alat Pematong Kertas	2,060,000	1	0	0
27	Perforator Besar	19,998,750	1	0	0
28	LCD Projector/Infocus	198,766,839	13	0	0
29	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	7,549,700	3	0	0
30	Focusing Screen/Layar LCD Projector	42,816,400	4	0	0
31	Alat Kantor Lainnya	4,896,000	3	0	0
32	Meja Kerja Kayu	131,777,750	47	0	0
33	Kursi Besi/Metal	545,360,050	300	0	0
34	Kursi Kayu	82,857,500	18	0	0
35	Sice	15,000,000	2	0	0
36	Bangku Panjang Besi/Metal	11,275,000	1	0	0

No.	Nama Barang	Harga Perolehan	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
37	Meja Rapat	94,253,850	29	0	0
38	Meja Komputer	4,730,000	1	0	0
39	Meja Telepon	2,640,000	1	0	0
40	Meja Resepsionis	19,206,000	3	0	0
41	Partisi	34,100,000	1	0	0
42	Meubelair Lainnya	4,752,000	6	0	0
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	11,744,950	2	0	0
44	Air Cleaner	13,200,000	2	0	0
45	Lemari Es	25,462,695	5	0	0
46	A.C. Sentral	32,725,000	1	0	0
47	A.C. Split	218,626,250	32	0	0
48	Alat Pendingin Lainnya	41,741,550	3	0	0
49	Kompor Gas (Alat Dapur)	1,320,000	2	0	0
50	Rak Piring Aluminium	3,740,000	2	0	0
51	Televisi	180,592,000	8	0	0
52	Loudspeaker	13,022,625	1	0	0
53	Sound System	16,280,000	1	0	0
54	Megaphone	2,420,000	2	0	0
55	Microphone	34,100,000	1	0	0
56	Microphone Table Stand	21,780,000	6	0	0
57	Unit Power Supply	10,890,000	1	0	0
58	Camera Video	16,872,000	7	0	0
59	Dispenser	4,995,000	1	0	0
60	Handy Cam	53,417,500	4	0	0
61	Disc Record Player	9,900,000	1	0	0
62	Digital Audio Storage System	1,760,000	2	0	0
63	Camera Electronic	28,820,000	4	0	0
64	Video Tape Recorder Portable	5,500,000	1	0	0
65	Flying Spot Scanner	72,600,000	2	0	0
66	Automatic Emergency Light	2,640,000	10	0	0
67	Camera Digital	252,199,500	17	0	0
68	Video Conference	22,949,250	1	0	0
69	Camera Conference	28,116,000	1	0	0
70	Mesin Jilid	8,880,000	2	0	0
71	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	144,750,000	1	0	0
72	GPS Receiver	54,000,000	4	0	0
73	Pesawat Telephone	14,610,000	7	0	0
74	Facsimile	9,768,000	3	0	0

No.	Nama Barang	Harga Perolehan	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
75	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	11,440,000	4	0	0
76	Wireless Amplifier	4,895,000	1	0	0
77	Alat Pemeriksa Beton	160,750,000	1	0	0
78	TV Monitor	39,694,766	2	0	0
79	Microwave Oven	4,620,000	2	0	0
80	Personal Computer	761,473,960	34	0	0
81	Drum Stainless Steel	2,728,000	8	0	0
82	Paper Scale	4,620,000	1	0	0
83	Mini Komputer	83,252,736	8	0	0
84	PC Workstation	33,133,500	1	0	0
85	P.C Unit	1,802,089,125	120	0	17
86	Lap Top	1,631,550,600	67	0	0
87	Note Book	1,508,488,192	59	0	24
88	Tablet PC	119,099,100	5	0	0
89	Hard Disk	38,838,236	6	0	0
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	954,442,163	110	0	0
91	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	422,903,400	15	0	0
92	External/ Portable Hardisk	3,620,000	4	0	0
93	Server	231,910,275	5	0	0
94	Modem	1,600,000	2	0	0
95	Wireless Access Point	1,860,000	4	0	0
96	Peralatan Jaringan Lainnya	28,600,000	1	0	0
97	Distance Meter Electronic	14,000,000	4	0	0
98	Bor Mesin Tumbuk Pakai Kabel	82,500,000	1	0	0
99	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	978,609,417	6	0	0
100	Software Komputer	5,039,009,000	10	0	0
101	Aset Tak Berwujud Lainnya	3,702,994,350	3	0	0
102	Tanah Rumpun Jalan dan Transportasi	5,324,090,986,222	8,936,842	0	0
103	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan Transportasi	371,891,747,279,018	60	0	0

1.4.2 Teknologi Informasi

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan untuk menunjang kinerja kegiatan didukung oleh sejumlah teknologi informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Integrated emonitoring (iemon.pu.go.id)
i-emon merupakan aplikasi monitoring evaluasi untuk memantau kemajuan kinerja keuangan dan fisik.

Integrated electronic Monitoring
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL
Status Database: 31 Desember 2024, 16:00 WIB

Selamat Sore,
Petugas i-eMonitoring
Satker SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL

Pengumuman

Update i-eMonitoring
Senin, 24 Februari 2021
Dalam Rangka keseragaman status data laporan dan risiko peng-update-an data, maka format report/laporan menggunakan status jam 08:00, 12:00 dan 16:00 WIB. Terima Kasih.

Senin, 4 Januari 2021
Modul Input Progres dan Pelaksanaan 2021.

Jumat, 11 September 2020
Modul Pemaketan 2021 dan Upload Dokumen (KAK, RAB, lainnya).

Senin, 24 Agustus 2020
Penyatuan/penggabungan eBudgeting ke dalam ieMonitoring.

Kamis, 30 Juli 2020
Untuk login sebagai **Kasatker** dan **PPK** menggunakan User dan Password **eHRM.**

Rabu, 22 Juli 2020

- Peningkatan kecepatan akses data
- Simplifikasi Monitoring dan Penginputan Padat Karya
- Rekap Progres Per Akun pada Satuan Kerja
- Penganggaran 2021

Terima Kasih

Berita

Video Penjelasan Pelaporan Progres Keuangan TA 2024 pada i-eMonitoring PUPR

[Undangan Rapat Kerja \(Raker\) Kementerian PUPR Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024](#)

[Buku Panduan Pengoperasian Pelaporan Tematik Tanggap Bencana dalam i-eMonitoring](#)

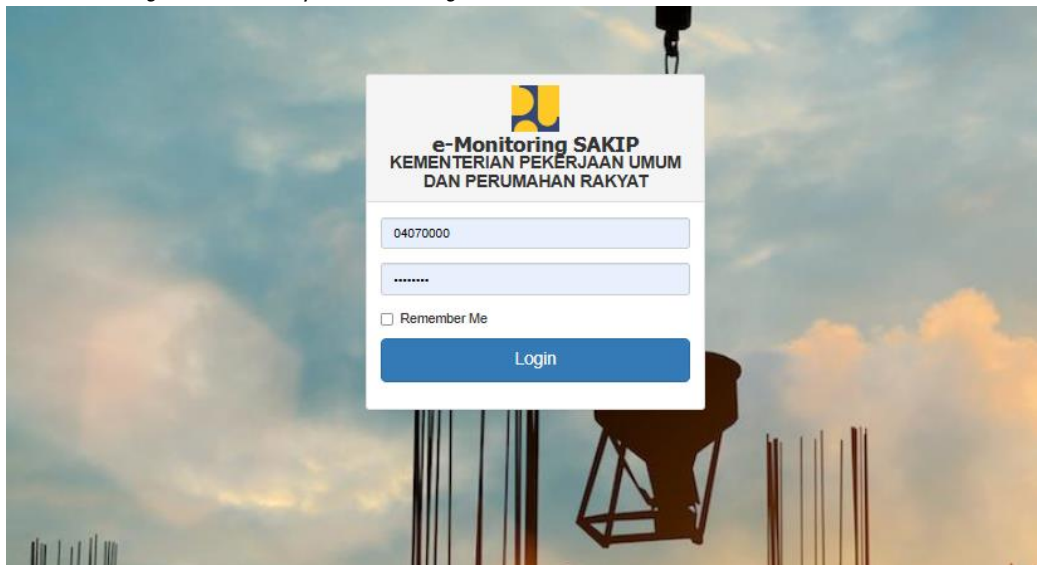
[Permintaan Update Progres Keuangan secara Langsung pada Sistem i-eMonitoring](#)

Video Panduan Hapus data RUP pada sirup LKPP melalui sistem e-monitoring

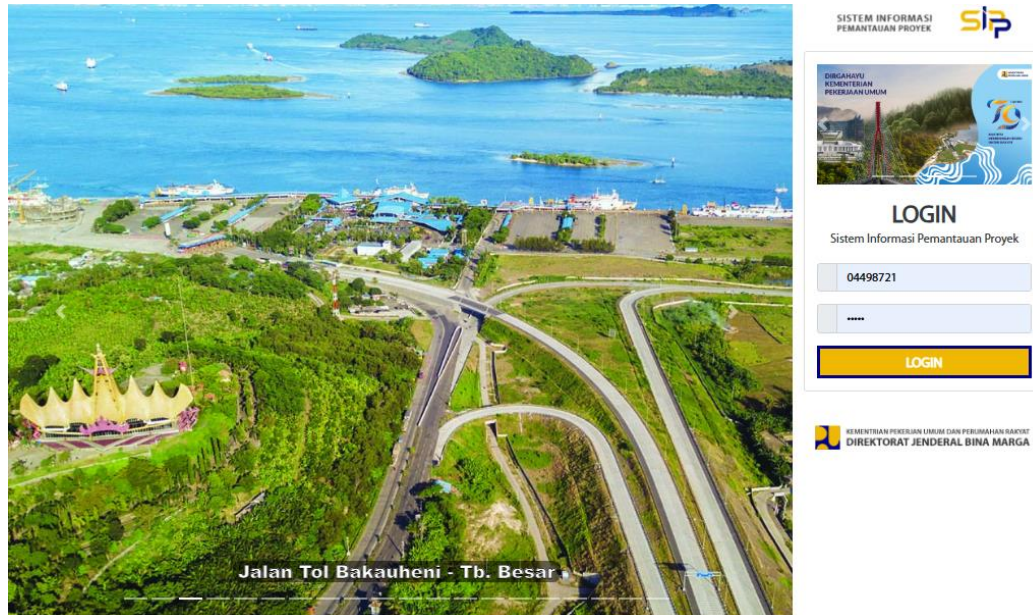
Download Surat Sekjen Perihal Peningkatan Tertib Administrasi Anggaran Melalui Sistem Integrated e-Monitoring dalam Rangka Penelitian Reviu RKA-KL, Pemakatan, dan Tender Seleksi Dini TA 2024

Jumat, 17 April 2020 14:56:36 WIB
[SE Mekanisme Padat Karya Direktorat Jenderal BM](#)

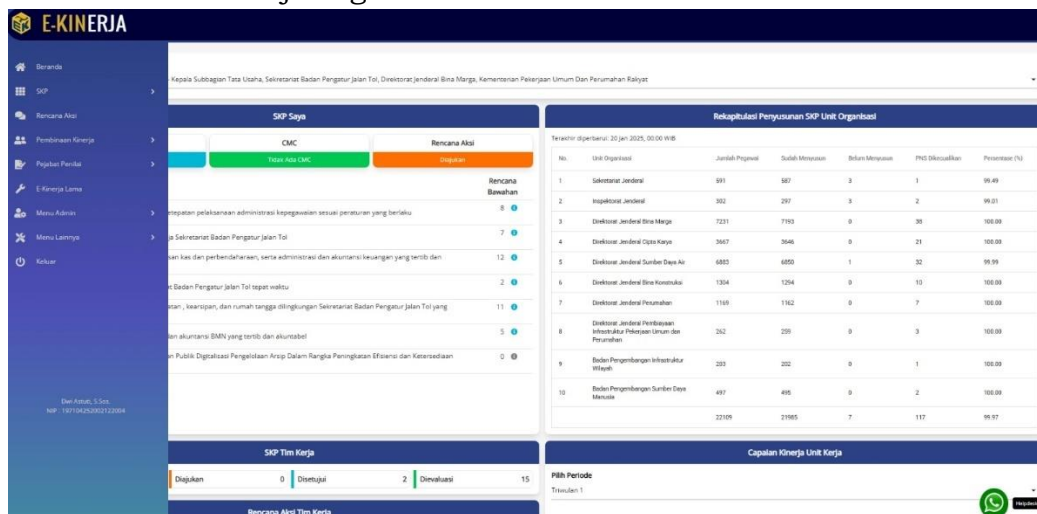
- Integrated emonitoring SAKIP (iemon.pu.go.id/sakip2)
e-sakip merupakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja seperti dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan, Laporan Kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan / unit kerja.



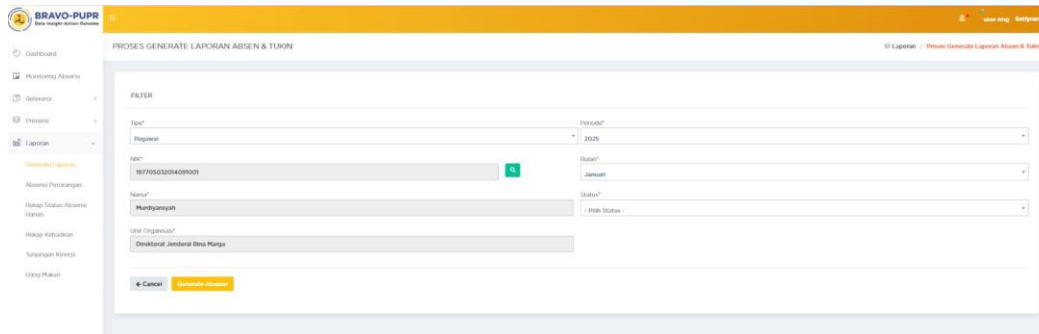
3. Sistem Pemantauan Informasi Proyek (SiPP) (sipp.pu.go.id)
Merupakan sistem informasi pemantauan proyek yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja yang menyajikan data kinerja bulanan.



4. Emonitoring kinerja (kinerja.pu.go.id)
Sistem informasi kinerja pegawai yang digunakan untuk pengisian rencana kerja serta penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan target dan sasaran kinerja organisasi.

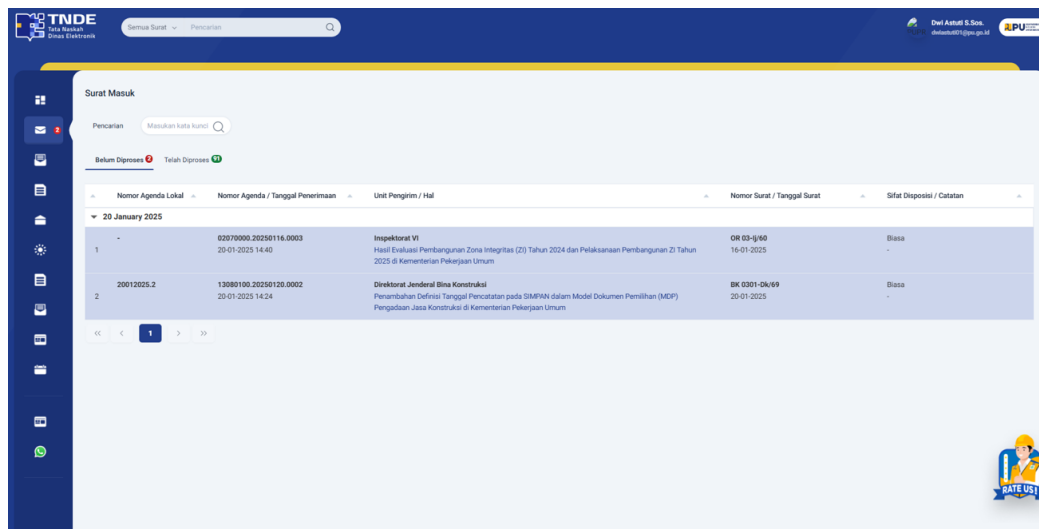


5. Bravo
Merupakan sistem aplikasi yang saling terintegrasi bertujuan memberikan data, informasi dan solusi bagi pegawai di lingkungan PUPR.



6. TNDE

Merupakan aplikasi tata naskah dinas elektronik yang digunakan untuk mengelola surat masuk dan keluar, mengelola disposisi, mencari arsip surat dan memperbaharui statu surat.



7. Ki-BIMA (kibima.binamarga.pu.go.id)

Merupakan aplikasi dalam pengendalian kepatuhan intern yang terintegrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang optimal, efektif dan efisien.



8. Website Badan Pengatur Jalan Tol (bpjt.pu.go.id)

Website BPJT merupakan platform komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, menyampaikan informasi, dan menjelaskan kebijakan dan program Kementerian Pekerjaan Umum khususnya untuk sektor jalan tol. Masyarakat dengan mudah dapat mengunjungi website di link bpjt.pu.go.id

Website BPJT terdapat beberapa menu yang dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi terkait jalan tol seperti menu profil jalan tol, investasi jalan tol, informasi publik, lelang jalan tol, survey online ATP dan WTP, informasi umum terkait jalan tol dan peraturan jalan tol.

Selain itu, terdapat beberapa menu yang akan mempermudah masyarakat mengetahui tarif tol yang akan dilintasi seperti menu tarif tol, berita terkini terkait jalan tol, buku tahunan BPJT, galeri foto dan video serta CCTV yang berfungsi untuk memantau kondisi arus lalu lintas jalan tol.



Berita Terkini



9. Aplikasi Tol Kita

Aplikasi Tol Kita merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai wadah yang akan memudahkan pengguna jalan tol dalam mencari informasi terkait jalan tol melalui mobile apps. Dengan fitur menampilkan tarif tol, peta jalan tol, CCTV, penagduan, rest area, call center, cuaca dan kuisioner.

FITUR-FITUR APLIKASI TOL KITA

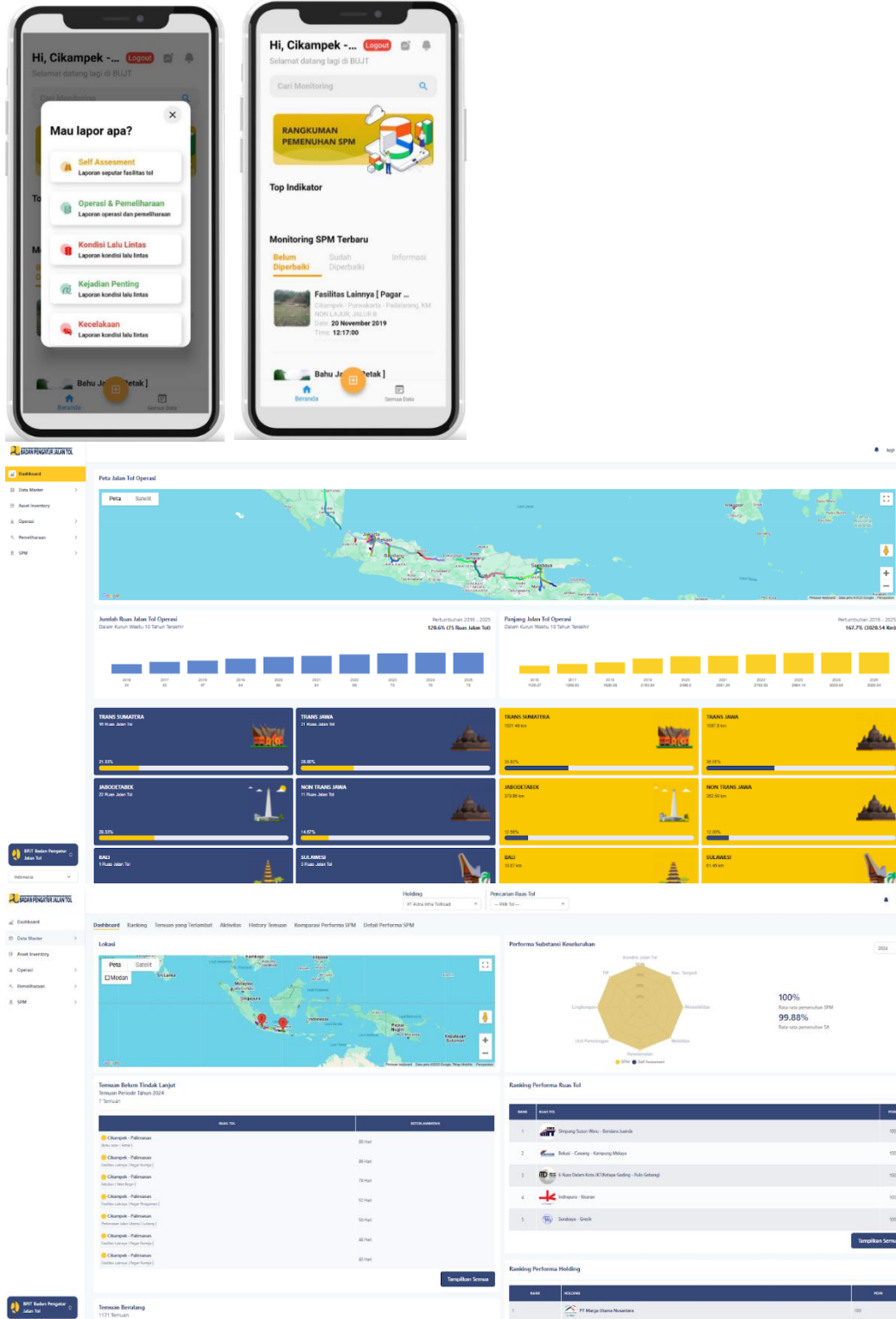


10. Aplikasi e-SPM

e-SPM merupakan platform digital yang digunakan untuk mendukung pengawasan, manajemen dan pemantauan operasional jalan tol di Indonesia.

Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan jalan tol, memastikan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan pengelolaan data.

Melalui e-SPM, BPJT dapat melakukan pemantauan secara real-time terkait operasional jalan tol melakukan evaluasi terhadap pengelolaan jalan tol, dan mendokumentasikan laporan serta pengolahan data yang diperlukan.



1.5 Isu Strategis

1. Proses penyelesaian piutang Eks BLU-BP SET BPJT pasca terbitnya keputusan menteri PU No 3070/KPTS/M/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 822 /Kpts/M/2021 Tentang Penyelesaian Permasalahan Layanan Dana Bergulir Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga pada saat ini sedang dalam proses audit oleh BPK RI.
2. Inovasi Multi Lane Free Flow (MLFF), merupakan sebuah inovasi yang direncanakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal transaksi pembayaran tol. MLFF merupakan pengembangan sistem transaksi tol dengan memanfaatkan teknologi, sehingga pengguna jalan tidak perlu berhenti untuk membayar tol, dan pembayaran dilakukan secara online yang terhubung dengan akun pembayaran setiap pengguna jalan tol. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Roatex Indonesia Tol System, yang terafiliasi dengan perusahaan pengumpulan tol asal Hungaria, yang telah berpengalaman melaksanakan MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Pada tahun 2024 implementasi MLFF masih dalam tahap persiapan pelaksanaan berupa pengembangan sistem, pembahasan pilihan metode transisi, kesiapan perubahan budaya masyarakat, dan kesiapan regulasi. Tantangan dari persiapan pelaksanaan implementasi MLFF yang dihadapi adalah belum selesainya proses pengembangan sistem yang dilakukan oleh PT RITS yang mengakibatkan mundurnya pelaksanaan Tanggal Operasi Komersial MLFF. Selanjutnya, terdapat kendala atas perbedaan persepsi proyek dari pihak PJKP (Menteri PU c.q. Kepala BPJT) maupun BUP (PT RITS) hingga adanya intervensi pemerintah Hungaria yang mana tidak sesuai dengan skema proyek KPBU, sehingga terjadi potensi perubahan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sebagai upaya untuk melaksanakan implementasi Sistem MLFF yang sesuai dengan kondisi teknis dan sosiokultural di Indonesia, telah dilakukan negosiasi pada tanggal 2-4 November 2024, namun pihak RITS hanya melaksanakan diskusi pada tanggal 2 November, dan menyampaikan draft Amandemen PKS MLFF yang belum melampirkan rencana teknis serta proposal finansial yang diajukan akibat modifikasi.

1. Pembentukan BLU DPJT merupakan salah satu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Disampaikan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan PNBPN dan penerimaan lain yang digunakan untuk pengembangan jaringan jalan tol, dapat dibentuk unit pengelola dana yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Persiapan Pembentukan BLU DPJT

dan Tim Teknis Pembentukan BLU DPJT pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa hal sebagai tindak lanjut pembentukan BLU DPJT sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Mei 2024 telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut pembentukan BLU DPJT, dengan hasil sebagaimana dalam surat Sekretaris BPJT Nomor UM 0102-Ts/286 tanggal 10 Juni 2024 hal Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Persiapan Pembentukan BLU DPJT (dokumen terlampir), disampaikan salah satunya bahwa diperlukan pembentukan satker dan penyempurnaan dokumen persyaratan pembentukan BLU DPJT.
 - b. Berdasarkan hasil rapat sebagaimana butir a di atas, Kepala BPJT telah menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor BM 0702-T1/478 tanggal 24 Juli 2024 hal Permohonan Pembentukan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Dukungan Pengusahaan Jalan Tol (Satker BLU DPJT) dan telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Nomor OR 0101-Db/1008 tanggal 23 September 2024 hal Usulan Nomenklatur Satuan Kerja TA. 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (dokumen terlampir). Usulan pembentukan Satker BLU juga dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembentukan unit pengelola dana untuk pengumpulan pendapatan tol pada Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi selama masa Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) yang akan menjadi cikal bakal Satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) yang melaksanakan pengelolaan PNPB untuk pengembangan jaringan jalan tol.
2. Monitoring pengoperasian Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol
- a. Pelaksanaan monitoring pengoperasian dan evaluasi aset Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol
Berdasarkan pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, bahwa pada jalan tol antarkota dan jalan tol perkotaan dapat disediakan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring pengoperasian dan evaluasi aset tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sesuai Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021 tentang tempat istirahat dan pelayanan jalan tol dengan hasil sebagai berikut :
 - i. Ruas Jalan Tol yang memiliki TIP adalah 48 ruas jalan tol dengan jumlah total TIP sebanyak 142 unit. Saat ini TIP beroperasi sebanyak 124 unit pada 34 ruas jalan tol dan sebanyak 18 unit sedang tahap konstruksi pada 9 ruas jalan tol;

- ii. Hasil monev untuk ruas jalan tol yang memiliki kewajiban TIP sesuai PPJT sampai dengan bulan Desember 2024 diperoleh rata-rata pemenuhan fasilitas umum sesuai Permen PUPR nomor 28 tahun 2021 pada 132 unit TIP di 39 ruas jalan tol adalah sebesar 67,15%. Indikator yang banyak tidak terpenuhi adalah jumlah toilet wanita kubikal, parkir kendaraan pengangkut bahan berbahaya, toilet laki-laki kubikal dan toilet laki-laki kubikal;
 - iii. Sebagian besar BUJT yang saat ini masih belum memenuhi fasilitas sebagaimana disyaratkan dalam Permen 28 tahun 2021. BUJT diminta untuk menyampaikan secara tertulis ke BPJT dan Direktorat Jenderal Bina Marga rencana jadwal pemenuhan fasilitas secara bertahap.
- b. Monitoring kewajiban Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sesuai dengan PPJT Badan Usaha Jalan Tol
- Berdasarkan pasal yang terdapat pada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol pada masing-masing BUJT perihal Cidera Janji Badan Usaha Jalan Tol disebutkan Badan Usaha Jalan dapat dikenai Cidera Janji Dalam Masa Konstruksi apabila BUJT gagal melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Rencana Teknik Akhir atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Ruas Jalan Tol yang memiliki kewajiban TIP sesuai PPJT adalah 29 ruas jalan tol dengan jumlah total kewajiban sebanyak 159 unit. Saat ini TIP telah beroperasi sebanyak 70 unit di 16 ruas jalan tol dengan bentuk Kerjasama pengelolaan TIP 68 unit Built Operate Transfer (BOT) dan 2 unit Built Operate Own (BOO) serta sebanyak 15 unit sedang tahap konstruksi di 7 ruas jalan tol.
3. Integrasi Jalan Tol
- Sesuai dengan PP No 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol Pasal 66 ayat (4) menyebutkan bahwa BPJT dapat mengusulkan perubahan pengumpulan Tol dan sistem penarifan pada Jalan Tol yang sudah beroperasi kepada Menteri setelah melakukan evaluasi. Adapun rencana integrasi untuk koridor JORR 2, Surabaya raya dan Medan raya sebagai berikut :
- a. JORR 2
- Saat ini masih dalam proses finalisasi pemodelan, konsep sementara integrasi JORR 2 adalah sebagai berikut:
- i. Tahap I (2025)
Koridor Barat (Cengkareng-Jagorawi/Cimanggis) terintegrasi terbuka tarif flat dengan opsi tarif Rp40.000 s.d Rp50.000, Koridor Timur (Cimanggis-Cibitung dan Cibitung-Cilincing) tertutup;
 - ii. Tahap II (>2026)

Koridor Barat (Cengkareng-Jagorawi/Cimanggis) terintegrasi terbuka tarif flat, Koridor Timur (Cimanggis-Cibitung dan Cibitung-Cilincing) terintegrasi terbuka tarif flat.

b. Surabaya Raya

Saat ini masih dalam proses finalisasi pemodelan, konsep sementara integrasi Surabaya Raya adalah sebagai berikut:

i. Tahap I (2025)

Koridor Tengah (Surgem, Sumo Waru s.d Warugunung dan Waru-Juanda) terintegrasi terbuka tarif flat dengan opsi tarif Rp19.000 s.d Rp21.000, Koridor Luar (Surgres, KLBM, Sumo) tertutup;

ii. Tahap II (>2026)

Koridor Tengah terintegrasi terbuka tarif flat, Sumo terbuka tarif flat, Surgres terbuka zonasi, KLBM tertutup. Masih terkendala Jaringan jalan tol belum terkoneksi penuh (Junction Kebomas belum terkonstruksi dan belum menunjukkan kebutuhan Integrasi sistem (tidak bersifat commuter dan menggunakan tidak lebih dari 2 ruas jalan tol dalam sekali perjalanan).

c. Medan Raya

Saat ini masih dalam proses finalisasi pemodelan, belum menunjukkan kebutuhan Integrasi sistem (tidak bersifat commuter dan menggunakan tidak lebih dari 2 ruas jalan tol dalam sekali perjalanan).

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategi yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai Rencana Strategis dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Rencana Aksi kinerja Per Program 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Pertanyaan Kuesioner Pemanfaatan LAKIP, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Dokumentasi Kegiatan, dan Serfikat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

2.1 Uraian Singkat Renstra/ Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Program Badan Pengatur Jalan Tol adalah “Program Infrastruktur Konektivitas”, dengan sasaran strategis pertama yaitu “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional”, dengan sasaran program “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” dan sasaran kegiatan “Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol”. Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas adalah rencana pembangunan 110,17 km jalan tol pada 2020-2024 dengan target operasi jalan tol 2.513,45 km sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, Jalan tol direncanakan untuk dibangun dan dioperasikan di Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong

peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol.

Kebijakan pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPJT yang “*bankable*” dan “*investor friendly*”, penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata laksana yang efektif dan efisien.

Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan *top-down*). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marginal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (*government support*), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (<i>Panjang Jalan yang dibangun</i>)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Prop: Pembangunan Jalan Tol	(2500 km)						682.903,8
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3.903,5
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	125.858,0

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (<i>Panjang Jalan yang dibangun</i>)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	(km)	60	75	80	75,04	57,9	110.823,0
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU)	(km)	30	50	60	50	57	43.309,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan APBN)	(km)	472	590	495	325	149	105.524,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan KPBU)	(km)	472	590	495	325	149	203.026,0
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	(km)	2	2	2	2	2,13	2.661,8
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan KPBU)	(km)	15	20	25	25	12,1	25.514,1
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	(km)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3.061,0
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan KPBU)	(km)	10	15	20	20	11,2	15.153,5
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan KPBU)	(km)	-	-	-	-	11,5	5.300,0
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan APBN)	(km)	-	-	-	-	15,5	7.100,0
Jalan Tol Samarinda-Bontang (Potensi)	(km)	-	-	-	-	5	2.970,0
Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder (Potensi)	(km)	-	-	-	-	10	1.700,0
Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak (SERR) (Potensi)	(km)	-	-	-	-	25	8.500,0

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Indikator (Panjang Jalan yang dibangun)	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jalan Tol Waru (Aloha) Wonokromo-Tanjung Perak	(km)	-	-	-	-	8	3.500,0
Jalan Tol Perkotaan Medan	(km)	-	-	-	10	20	15.000,0

Adapun Badan Pengatur Jalan Tol telah merencanakan pembangunan Ruas Jalan Tol baru, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Rencana Pembangunan Jalan Tol

No.	Ruas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 yang sudah memiliki PPJT	338,41	346,15	262,80	76,80	263,07
1.	Trans Jawa	0,00	29,60	13,70	31,00	27,90
2.	Non Trans Jawa	32,11	137,99	73,05	00,00	170,97
3.	Jabodetabek	61,69	104,86	34,15	00,00	0,00
4.	Sumatera	186,81	55,20	141,90	45,80	64,20
5.	Kalimantan	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sulawesi	24,80	18,50	0,00	0,00	0,00
B	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 (ruas baru/belum PPJT)	0,00	0,00	0,00	570,02	656,20
1.	Non Trans Jawa	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
2.	Jabodetabek	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00
3.	Sumatera	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
4.	Kalimantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga

2.1.1 Visi dan Misi

Badan Pengatur Jalan Tol mengacu pada visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, yaitu Visi **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk**

Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait bidang jalan untuk mencapai sasaran yakni Memperkuat Infrastruktur untuk Kebijakan penyelenggaraan jalan nasional untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar khususnya pada:

1. Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama pada Kegiatan Prioritas Keselamatan dan
2. Keamanan Transportasi, termasuk infrastruktur perkotaan (pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan; dan
3. Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi terutama pada Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan.

Secara umum kebijakan dan strategi utama di dalam RPJMN 2020-2024 terkait dengan bidang jalan dapat dibagi ke dalam 6 bagian, yakni:

1. Peningkatan penerapan jalan berkeselamatan sebagai salah satu pilar dari RUNK LLAJ; (Infrastruktur Pelayanan Strategi: Keselamatan dan Keamanan Transportasi)
2. Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan; (Infrastruktur Ekonomi: Konektivitas Jalan)
3. Skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku

pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

4. Pembangunan jalan nasional pada lintas utama pulau, untuk mendukung kawasan-kawasan prioritas nasional (KI dan KSPN prioritas, simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan);
5. Peningkatan efektivitas perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah; dan
6. Inovasi pendanaan infrastruktur seperti KBPU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan progra dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Terdapat indikasi Proyek Prioritas (termasuk di dalamnya 3 *major project*) bidang jalan dalam RPJMN 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan jalan berkeselamatan;
2. Pembangunan jalan strategis;
3. Pembangunan jalan tol;
4. Pembangunan jalan nasional mendukung kawasan prioritas (KI prioritas, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan);
5. Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A);
6. Preservasi jalan nasional (peningkatan/pelebaran jalan nasional);
7. Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah;
8. Pengembangan Wilayah Suramadu;
9. Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan; dan Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, Sekretariat BPJT yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala BPJT dan Secara administratif bertanggung jawab Kepada Menteri yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada BPJT dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian perusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan persiapan rekomendasi pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
- b. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan perusahaan Jalan Tol;
- c. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;

- d. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan Jalan Tol;
- e. Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
- f. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

Sasaran kegiatan Sekretariat Badan Pangatur Jalan Tol adalah Pencapaian Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dan dengan parameter yaitu Panjang Jalan Tol yang Beroperasi. Sedangkan output kegiatan ini berupa **Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol.**

2.1.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Badan Pangatur Jalan Tol memiliki program kerja sebagai berikut:

Tabel 2.1.3 Program dan kegiatan

IKSP		SAT	2020	2021	2022	2023	2024
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional							
<i>Parameter</i>	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	338,41	346,15	262,8	282,43	194,88
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							
<i>Parameter</i>	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	-	100,00	100,00	100,00

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 - 2024. Didalam perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2024 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2024 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DIPA Awal tahun 2024.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, pada perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2024 terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dan Meningkatnya Kualitas Tata kelola Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.
- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan

Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol. Dalam revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol dan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaran Jalan dengan output Layanan umum, Layanan Perkantoran dan Layanan Sarana Internal.

- c. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2024.
- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2023. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2024.
- e. **Jumlah anggaran**, merupakan total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2024.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Pada tahun 2024 telah disusun Perjanjian Kinerja awal berdasarkan DIPA awal, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : APRI ARTOTO
 Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
 Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024



PIHAK KEDUA
 HEDY RAHADIAN



PIHAK PERTAMA
 APRI ARTOTO

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2024

Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	85,02 %	100,00 %
	Parameter Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	240,13 Km	418,85 Km
	Rincian Output		
	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00 %	100,00 %
	Rincian Output		
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBB 951 Layanan Sarana Internal	54,00 Unit	57,00 Unit

Kegiatan :
 1. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol
 2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
 Total Anggaran

Anggaran
 Rp 61.701.948.000
 Rp 17.806.267.000
 Rp 79.508.215.000



Direktur Jenderal Bina Marga,
 Hedy Rahadian



Jakarta, 5 Januari 2024
 Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,
 Apri Artoto

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) 2024

Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat BPJT 2024

2.2.2 Perjanjian Kinerja Revisi



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : APRI ARTOTO
 Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
 Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA APRI ARTOTO

Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2024



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	83.84 %	100.00 %	
	Parameter : Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	236.80 KM	194.88 KM	
ABF 010	Pengaturan Pengusahaan Pengawasan Jalan Tol	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %	
	Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100.00 %	100.00 %	
	EBA 962	Layanan Umum	-	1.00 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	54.00 Unit	56.00 Unit	

Kegiatan:

1. Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol	Anggaran:
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Rp. 59,017,553,000
Total Anggaran:	Rp. 18,070,853,000
	Rp. 77,088,406,000

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA SEKRETARIS
 RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL
 APRI ARTOTO

Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat BPJT 2024

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

- a) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mengalami revisi karena Perubahan asumsi dalam pencapaian sasaran program pada indikator kinerja sasaran program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Perubahan alokasi anggaran dikarenakan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PB 0201 - Db/05 tentang Usulan Revisi Anggaran TA. 2024 di Lingkungan Direktorat Bina Marga dan perubahan target panjang jalan tol yang beroperasi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi TA. 2024, panjang jalan tol yang beroperasi mengalami perubahan target yaitu dari 275,14 KM menjadi 194,88 KM.

2.2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Outcome)

Tabel 2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (outcome)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		%	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	<i>Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>	Km	240,13	194,88	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	%	100,00	100,00	
Total Anggaran			79,508,215,000	77,088,406,000	

2.2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Output)

Tabel 2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)

NO	OUTPUT		SAT	TARGET		KET
				PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional			%	100,00	100,00	
Indikator Kinerja Kegiatan						
1	ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			%	100,00	100,00	
Indikator Kinerja Kegiatan						
1	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	1,00	1,00	
2	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	
3	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	57,00	56,00	
<i>Total Anggaran</i>				79,508,215,000	77,088,406,000	

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.1 Metode Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran program dilakukan dengan cara menghitung realisasi terhadap target capaian (persentase).

Tabel 2.3.1 Metode Pengukuran Outcome Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	OUTCOME	PERJANJIAN KINERJA		METODE PENGUKURAN
		TARGET	SATUAN	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional				
IKSP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		100,00	%	
Parameter	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	194,88	Km	Total panjang jalan tol beroperasi pada Tahun 2024

Tabel 2.3.2 Metode Pengukuran Output Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	OUTPUT	PERJANJIAN KINERJA		METODE PENGUKURAN
		TARGET	SATUAN	
1	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00	Rekomendasi Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan capaian fisik sub komponen yang mendukung output
2	Layanan Umum	1,00	Layanan	Jumlah capaian fisik sub komponen yang mendukung output tersebut
3	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	Jumlah capaian fisik sub komponen yang mendukung output tersebut
4	Layanan Sarana Internal	56,00	Unit	Jumlah unit/ capaian fisik sub komponen yang mendukung output tersebut

Metode pengukuran capaian output menggunakan parameter jumlah layanan yang dihasilkan sesuai dengan paket pekerjaan (subkomponen) dalam satu tahun.

$$\text{Capaian RO Y (\%)} = \frac{(\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket A} \times \text{Pagu Paket A}) + (\text{Real Fisik (\%)} \text{ Paket B} \times \text{Pagu Paket B}) + \text{dst}}{\text{Pagu Paket A} + \text{Paket B} + \text{dst}} \times 100\%$$

Realisasi capaian kinerja output Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan realisasi capaian kinerja dari paket-paket kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2024. Data capaian kinerja bersumber dari

data SIPP terpadu Direktorat Jenderal Bina Marga dan iemon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.4 Target Kinerja Tahun Berjalan Menurut Renstra

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Indikator kinerja kegiatan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tidak selaras/ tidak sesuai dengan indikator kinerja kegiatan/ output pada DIPA yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2024.

Perbandingan target capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja, RKA-K/L revisi terakhir dan Renstra Sekretariat Badan Pengatur jalan Tol 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut :

2.4.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

Tabel 2.4.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan		%	100,00	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	<i>Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>	Km	647,00	418,85	194,88	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen						

Kementerian PUPR						
IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan		%	-	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	%	-	100,00	100,00	Tidak selaras dengan PK 2024

2.4.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra

Sandingan output dan target pada perjanjian kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2024 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

Tabel 2.4.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan						
1	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi kebijakan	-	1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan						
1	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	-	1,00	1,00	Tidak selaras dengan PK 2024

2	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	-	1,00	1,00	Tidak selaras dengan PK 2024
3	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	-	57,00	56,00	Tidak selaras dengan PK 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui adanya ketidakselarasan output yang tercantum pada Renstra dengan output yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2024. Hal ini disebabkan karena penyusunan dokumen anggaran belum mengacu pada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2020-2024.

BAB 3



AKUNTABILITAS KINERJA

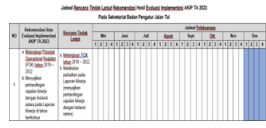

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja (Lakin).

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

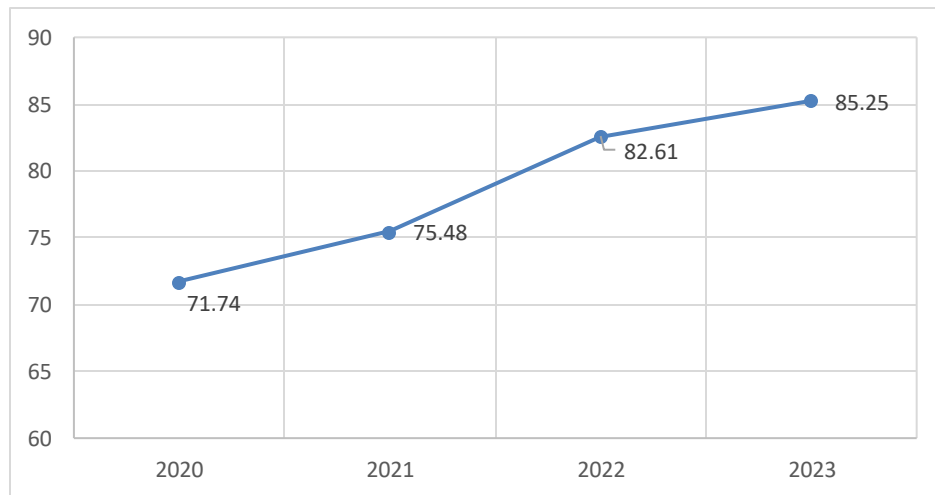
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA. 2023 atas akuntabilitas kinerja pemerintah, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan nilai **85,25%** dimana masuk dalam kategori **A** atau dengan predikat **Memuaskan** dan telah melaksanakan beberapa rekomendasi pada TA. 2024, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 3.1.1. Tabel berikut menyajikan tindak lanjut atas hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun sebelumnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Tabel 3.1.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP TA.2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumentasi
A. Perencanaan Kinerja			
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2019 – 2022; b. Menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan instansi setara pada Laporan Kinerja TA. 2024 	Akan menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan instansi setara pada Laporan Kinerja TA. 2024	
B. Pengukuran Kinerja			
1.	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam pencapaian kinerja dan memperbaharui data dukung untuk TA. 2024	Koordinasi secara berkala dengan melakukan rapat pemantauan monitoring evaluasi dan pencapaian kinerja	
C. Pelaporan Kinerja			

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Dokumentasi
1.	Menyajikan perbandingan realisasi anggaran Unit Kerja / UPT tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap Renstra pada Laporan Kinerja TA. 2024	Akan Menyajikan perbandingan realisasi anggaran Unit Kerja / UPT tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap Renstra pada Laporan Kinerja TA. 2024	
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
1.	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam mempertahankan capaian kinerja dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada TA. 2024	Koordinasi secara berkala antar unit kerja dengan melakukan rapat internal setiap bulan	 

Hasil penilaian evaluasi SAKIP Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1.1 Hasil Penilaian SAKIP TA 2020 - 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penilaian evaluasi SAKIP Sekretariat BPJT mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ditahun 2020 nilai evaluasi SAKIP 71,74, ditahun 2021 nilai evaluasi SAKIP 75,48 pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan nilai 82,61 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan nilai 85,25.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2024 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran program Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yaitu **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional** dan **Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**, dengan 2 indikator kinerja sasaran program yaitu **Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional** dan **Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR**.

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	100,00	100,00	100,00	
<i>Parameter</i>	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	194,88	184,73	94,79	Capaian tidak tercapai dikarenakan ruas yang masih dalam proses Uji Laik Fungsi yaitu ruas Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Prapat
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						

Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	100,00	100,00	100,00	
Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, dilaksanakan oleh unit kerja “Sekretariat Badan Pengaturan Jalan Tol”, dengan sasaran kegiatan “Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan” Sasaran kegiatan tersebut memiliki target 100%, dengan parameter “Panjang jalan tol beroperasi” yang dilakukan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Target panjang tol beroperasi tersebut pada akhir tahun 2024 adalah 932,6 km.

Perhitungan Sasaran Kegiatan :

$$SK\ 3.9 = \frac{\text{Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun}_i}{\text{Target panjang tol beroperasi pada tahun}_i} \times 100\%$$

$$SK\ 3.9 = \frac{184,73}{194,88} \times 100\%$$

$$SK\ 3.9 = 94,79\ \%$$

Dimana:

1. SK 3.9 = Sasaran kegiatan 3.9 (memiliki satuan %)
2. Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun, (Km) = Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024
3. Target panjang tol beroperasi pada tahun, (Km) = Target jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

No	Parameter Sasaran Kegiatan 3.9	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Tol Beroperasi	Km	338	346	263	282	195

Untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran Program, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mempunyai parameter Panjang Jalan Tol yang Beroperasi. Pada Tahun 2024 ini, capaian parameter tersebut tidak tercapai dikarenakan adanya ruas yang belum beroperasi dan dalam proses uji laik fungsi, yaitu ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Sebagian Seksi 2 Kuala Tj-Indrapura).

3.2.2 Capaian Indikator Kinerja Output

Tabel 3.2.2 Perbandingan Capaian Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Tercapai
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								
Indikator Kinerja Kegiatan								
EBA 962	Layanan Umum	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Tercapai
EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	Tercapai
EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	56,00	56,00	56,00	100,00	100,00	Tercapai

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol memiliki Sasaran Program 1 yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional memiliki 1 indikator kegiatan yaitu Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol dan Sasaran Program 2 yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR memiliki 3 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Adapun uraian mengenai capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sebagai berikut:

1. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Tabel 3.2.3 Capaian kinerja berdasarkan sub komponen

NO.	OUTPUT/ SUB KOMPONEN	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
ABF 011	Pengaturan dan Pembinaan Kepatuhan Internal	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	100	100
AA	Penyusunan, Perencanaan Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA.2024	Laporan	1	1	1	100	100
AB	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Laporan	1	1	1	100	100
AC	Penataan Arsip	Laporan	1	1	1	100	100
AD	Pemeliharaan Gedung	Laporan	1	1	1	100	100
AE	Manajemen Bidang Ke Tata Usahaan	Laporan	1	1	1	100	100
AF	Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol	Laporan	1	1	1	100	100
AG	Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Konsesi Jasa BPJT	Laporan	1	1	1	100	100
BA	Monitoring Pemantauan Pemeliharaan Aset, Layanan Jalan Tol, Dan Penyesuaian Tarif Jalan Tol	Laporan	1	1	1	100	100
BB	Kajian Integrasi Jalan Tol	Paket	1	1	1	100	100
BC	Bantuan Teknis Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Aset Jalan Tol	Paket	1	1	1	100	100
BD	Panel Ahli Dalam Rangka Dukungan Penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF)	Laporan	1	1	1	100	100
BE	Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF)	Laporan	1	1	1	100	100
CA	Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Self Assessment Aspek Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Paket	1	1	1	100	100
CB	Project Management Office Pengelolaan Data Informasi Dan Fasilitasi Layanan Operasi Jalan Tol	Paket	1	1	1	100	100
CC	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol	Paket	1	1	1	100	100

NO.	OUTPUT/ SUB KOMPONEN	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
CD	Pengelolaan Data Dan Pemantauan Layanan Jalan Tol	Laporan	1	1	1	100	100
DA	Bantuan Dukungan Persiapan Dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Paket	1	1	1	100	100
DB	Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Laporan	1	1	1	100	100
DC	Kajian Ability-To-Pay (ATP) Dan Willingness-To-Pay (WTP) Pada Beberapa Ruas Jalan Tol	Paket	1	1	1	100	100

Paket kegiatan (sub kmponen) yang menjadi indikator pendukung output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol, yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan, Perencanaan Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA.2024

Kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2024 adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat BPJT di Sub bagian Tata Usaha yaitu :

1. Penyusunan RKA-K/L 2024
2. Penyusunan Rencana Aksi
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan
5. Menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka laporan keuangan dan BMN
6. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko dan SPIP
7. Penyusunan LKIP TA.2024

Output Pekerjaan :

1. Dokumen RKA-K/L 2024
2. Dokumen Rencana Aksi
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Laporan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan
5. Laporan Keuangan
6. Laporan Manajemen Risiko dan SPIP
7. Laporan LKIP TA.2024

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan, pelaporan SAKIP yang terhimpun dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di Sub bagian Tata Usaha, seperti Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;

Output Pekerjaan :

1. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;

Manfaat :

Pembinaan dan pemberdayaan SDM merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi sub bagian Tata Usaha agar pengelolaan data kepegawaian dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan didukung dengan administrasi yang baik dan benar demi tercapainya pelayanan prima bagi setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

c. Penataan Arsip

Kegiatan penataan arsip mencakup :

1. Identifikasi arsip
2. Pendeskripsian arsip
3. Pembungkusan arsip
4. Penomoran definitif
5. Penataan fisik arsip
6. Pelabelan boks
7. Pengiriman arsip pusat arsip bina marga
8. Penempatan boks arsip yang telah dilabelin ke pusat arsip Bina Marga

Output Pekerjaan :

Penataan Arsip yang tertata dengan rapih dalam pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penataan arsip.

Hambatan :

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum optimal dalam pelaksanaan dan ruang penyimpanan arsip in aktif yang terbatas.

Alternatif Solusi :

Memaksimalkan SDM yang ada dan mengajukan penambahan SDM untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada.

Dokumentasi :

Verifikasi dan Penyimpanan Arsip di Gedung Arsip Bina Marga Citeureup



d. Pemeliharaan Gedung

Untuk memaksimalkan kegiatan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dilakukan kegiatan pekerjaan pemeliharaan gedung / Renovasi Ruang kantor. Maksud dari kegiatan ini adalah memfasilitasi kebutuhan ruangan untuk pegawai sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

Proses Renovasi Ruangan di Lingkungan Set



e. Manajemen Bidang Ke Tata Usahaan

Manajemen Ketatausahaan merupakan suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses kerja, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang meliputi penyimpanan dan pengarsipan, serta pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang infrastruktur dalam hal ini terkhusus infrastruktur jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol memiliki kewajiban untuk memiliki manajemen ketatausahaan yang baik sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Manajemen Ketatausahaan yang diupayakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuaapan berdasarkan ISO 37001:2016
- b. Pendampingan Sistem Manajemen Anti Penyuaapan berdasarkan ISO 37001:2016
- c. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol
- d. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol

Tabel 3.2.4 Kegiatan Manajemen Bidang Ke Tata Usahaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksana	Lokasi
1	Pembahasan Tim Pokja Zona Integritas & Finalisasi Zona Integritas	Februari 2024	Banten
2	Sosialisasi Penerapan ISO 27001 2016 SMAP	Mei 2024	Bogor
3	Konselisai dan Penyelesaian Piutan BLU	Juli 2024	Tangerang
4	Pelatihan Audit Internal Penerapan ISO 37001 2016 SMAP	September 2024	Tangerang
5	Koordinasi Kegiatan Menghadapi Akhir Tahun	November 2024	Tangerang
6	Sosialisasi Pemahaman dan Interpretasi Klausul SNI ISO 37001 2016 SMAP	November 2024	Tangerang

Output Pekerjaan :

- a. Penyusunan rancangan Pedoman dan SOP (1 laporan)
- b. Sosialisasi Pedoman dan SOP terkait SMAP (1 laporan)
- c. Pelatihan Audit Internal SMAP (1 laporan)
- d. Sosialisasi SMAP kepada pihak eksternal (1 laporan)

- e. Pelaksanaan Audit Internal SMAP (1 laporan)
- f. Rapat Tinjauan SMAP (1 laporan)
- g. Pelaksanaan Audit Eksternal SMAP (1 laporan)

Manfaat :

- a. Membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan ISO 37001:2016 SMAP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol sehingga memenuhi persyaratan standar ISO 37001:2016;
- b. Membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol dalam membangun kesadaran (awareness), sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pemahaman dan pendampingan penerapan SMAP sesuai standar ISO 37001:2016;
- c. Membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol dalam mengembangkan sistem yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, serta menangani tindakan penyuapan baik bersifat inbound maupun outbound bribery;
- d. Tercapainya penerapan SMAP secara efektif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol yang memenuhi persyaratan standar ISO 37001:2016 SMAP sehingga siap dilakukan audit oleh Lembaga Sertifikasi yang independen.

Hambatan : -

Alternatif Solusi :

Kegiatan Awareness tentang ISO 37001 2016 SMAP dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk seluruh pegawai BPJT (internal) dan Penyedia Jasa dan Vendor (eksternal). Hal ini untuk memenuhi sasaran SMAP di BPJT yaitu Peningkatan Kompetensi dan Awareness SMAP bagi pegawai BPJT sebesar 100%.

Dokumentasi :



Sosialisasi Penerapan ISO 27001 2016 SMAP



f. Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol

Satuan kerja (Satker) Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT merupakan Satker di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersumber dana Rupiah Murni dengan tugas dan fungsi pengelolaan piutang pokok, Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah. Piutang pokok merupakan saldo pinjaman dana bergulir dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum selesai dibayarkan oleh BUJT sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sehingga proses penagihannya perlu dilanjutkan ke tahun 2024. Oleh karena itu, pengelolaan piutang dan penyusunan laporan keuangan dianggap penting guna memastikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diterima oleh negara secara tepat waktu dan tepat jumlahnya dan laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Output Pekerjaan :

Laporan Keuangan BA BUN 999.03

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring dan penagihan piutang pendanaan pengusahaan jalan tol.

Hambatan :

Dengan adanya selisih perhitungan bunga terkait nilai tambah dan denda maka diperlukan keputusan lebih lanjut terkait hal tersebut sehingga sebelum keluar terbit surat atau rekomendasi dari BPK RI dan kemenkeu proses reklas piutang EKS BLU BPJTt sampai saat 31 des 2024 angka di neraca masih berdasarkan penyeteroran BUJT per 31 des 2024.

Alternatif Solusi :

BPJT (Kementerian Pekerjaan Umum) telah mengirimkan surat permohonan diskusi kepada BPK RI terkait proses reklas piutang EKS BLU BPJT.

Dokumentasi :

Pembahasan Proses Penyelesaian Piutang



g. **Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Konsesi Jasa BPJT**

Penyusunan Laporan Pencatatan Aset Konsesi Jasa merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan anggaran yang telah diberikan. Laporan Konsolidasi Pencatatan Aset Konsesi Jasa disusun guna memberikan informasi kepada pengguna laporan untuk meningkatkan akuntabilitas, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas, Laporan Pencatatan Aset Konsesi Jasa di periksa secara periodik oleh BPK.

Penyusunan dilakukan secara rutin mulai dari Semester II Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Untuk keperluan itu, dibutuhkan bimbingan dan pendampingan dari badan usaha.

Output Pekerjaan :

Output dari Kegiatan ini adalah Pelaporan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Konsesi Jasa dan Kewajiban Konsesi Jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas, kondisi, dan nilai Aset Konsesi Jasa pada seluruh ruas jalan tol serta pedoman penyusunannya, yang dilengkapi dengan laporan sebagai berikut :

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Pencatatan Inventarisasi Aset konsesi jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas, kondisi, dan nilai Aset konsesi jasa pada seluruh Ruas Jalan Tol sampai tahun 2024.

Hambatan : -

Dokumentasi :

Konsolidasi Pencatatan Aset Koneksi Jasa Pada Laporan Keuangan Set BPJT



h. Monitoring Pemantauan Pemeliharaan Aset, Layanan Jalan Tol, Dan Penyesuaian Tarif Jalan Tol

Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Bidang Pemeliharaan Pemantauan Aset mempunyai tugas dan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian tarif;
2. Penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
3. Penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol;
4. Penyiapan dukungan pengawasan penataan aset; dan
5. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan jalan tol.

Lingkup kegiatan dari Swakelola monitoring pemantauan pemeliharaan aset, layanan jalan tol, dan penyesuaian tarif jalan tol adalah:

1. Pengawasan dan Penataan Aset dan Pengelolaan PNBP:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Rumija
 - b. Melakukan monitoring dan fasilitasi terhadap pengelolaan PNBP perusahaan jalan tol
 - c. Melaksanakan tahapan pembentukan BLU DPJT
 - d. Melakukan pendampingan leger jalan tol.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aset jalan tol
2. Penyiapan Rekomendasi tarif dan penyesuaian:
 - a. Penyusunan rekomendasi tarif awal
 - b. Penyusunan rekomendasi penyesuaian tarif reguler
 - c. Penyusunan rekomendasi penyesuaian tarif non-reguler (akibat perubahan rencana usaha)
3. Pengawasan Layanan dan Sistem Pengumpulan Tol
 - a. Penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan jalan tol
 - b. Penyiapan dukungan Sistem Integrasi Jalan Tol
 - c. Pemantauan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
 - d. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian fasilitas eksisting dengan aturan atau pedoman tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) jalan tol

4. Pekerjaan Tambahan
 - a. Perubahan Lingkup
 - b. Lelang Jalan Tol

Selain itu terdapat lingkup pekerjaan Dukungan Manajemen dalam pelaksanaan Swakelola Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset yang terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Operasional; dan Pemeliharaan Perkantoran PPK Bidang PPA
2. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan
3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Output Pekerjaan :

Laporan Akhir

Capaian indikator sasaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Penataan Aset dan Pengelolaan PNBPN:
 - a. Pemantauan Pendampingan Kegiatan Pembuatan Dokumen Leger Jalan Tol

Berdasarkan pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bahwa setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi. Hingga saat ini, telah dilaksanakan pembuatan leger jalan tol melalui pendampingan Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan sebanyak 41 Ruas Jalan Tol. Namun demikian, terdapat 16 Ruas Jalan Tol yang belum menyusun dokumen leger jalan dan 19 Ruas Jalan Tol yang belum melakukan pemutakhiran dokumen leger dengan rincian sebagai berikut:

 - i. Jalan Tol yang Belum Menyusun Dokumen Leger Jalan

Tabel 3.2.5 Ruas Tol yang Belum Menyusun Dokumen Leger Jalan

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Tahun Operasi	Badan Usaha Jalan Tol
1	Betung - Jambi	Seksi 3 : Bayung Lencir - Tempino	2024	PT Utama Karya (Persero)
2	Binjai - Langsa	Seksi 2 : Stabat – Kuala Bingai	2023	PT. Utama Karya (Persero)
		Seksi 2 : Kuala Bingai – Tj Pura	2024	
3	Bogor Ring Road	Seksi 3A : Sp. Yasmin-Kayu Manis	2021	PT. Marga Sarana Jabar
4	Indrapura - Kisaran	Seksi 1 : Indrapura – Limapuluh	2023	PT. Utama Karya (Persero)
		Seksi 2 : Limapuluh – Kisaran	2024	
5	Jakarta - Bogor - Ciawi		1978	PT. Jasa Marga (Persero)
6	Jakarta - Cikampek		1988	PT. Jasamarga Transjawa Tol
7	Jakarta - Tangerang		1984	PT. Jasa Marga (Persero)
8	JORR Non S (Seksi W2S, E1, E2 dan E3)		1995	PT. Jasa Marga (Persero)
9	Kertosono - Mojokerto	Seksi I : Bandar – Jombang	2014	PT Marga Harjaya Infrastruktur
		Seksi II : Jombang – Mojokerto Barat	2017	
		Seksi III : Mojokerto Barat – Penompo	2016	
		Seksi IV : Bandar – Kertosono	2019	
10	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	Seksi 3 : Junction Tebing Tinggi - IC Dolok Merawan	2024	PT. Utama Marga Waskita
11	Padalarang - Cileunyi		1991	PT. Jasa Marga (Persero)
12	Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang	Seksi : Bangkinang – XIII Koto Kampar	2024	PT. Utama Karya (Persero)
13	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo		1985	PT. Jasa Marga (Persero)
14	Solo - Jogja -	Seksi 1 Paket 1.1 : Solo-	2024	PT Jasamarga

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Tahun Operasi	Badan Usaha Jalan Tol
	NYIA Kulon Progo	Klaten		Jogja Solo
15	Surabaya - Mojokerto	Seksi 1A : Waru – Sepanjang	2011	PT. Jasamarga Surabaya Mojokerto
		Seksi 1B : Sepanjang – WRR	2017	
		Seksi 2 : WRR – Driyorejo	2017	
		Seksi 3 : Driyorejo – Krian	2017	
		Seksi 4 : Krian – Mojokerto	2016	
16	Tangerang - Merak		1992	PT. Marga Mandala Sakti

- ii. Jalan Tol yang Perlu Melakukan Pemutakhiran Dokumen Leger Jalan

Tabel 3.2.6 Ruas Tol yang Belum Menyusun Dokumen Leger Jalan

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Tahun Operasi	Badan Usaha Jalan Tol
1	Bogor Ring Road	Seksi 1 : Sentul Selatan-Kd. Halang	2019	PT. Marga Sarana Jabar
		Seksi 2A : Kd. Halang-Kd. Badak	2019	PT. Marga Sarana Jabar
		Seksi 2B : Kd. Badak-Sp. Yasmin	2019	PT. Marga Sarana Jabar
2	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jbt. Tiga/Pluit		2013	PT. Citra Marga Nusaphala Persada
3	Ciawi - Sukabumi	Seksi 1 : Ciawi-Cigombong	2019	PT. Trans Jabar Tol
4	Gempol - Pandaan		2018	PT. Jasamarga Pandaan Tol
5	Gempol - Pasuruan		2018	PT. Jasamarga Gempol Pasuruan
6	Krian - Legundi - Bunder - Manyar		2019	PT. Waskita Bumi Wira
7	Kunciran - Serpong		2019	PT. Marga Trans Nusantara

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Tahun Operasi	Badan Usaha Jalan Tol
8	Makassar Seksi IV		2015	PT. Jalan Tol Seksi Empat
9	Medan - Binjai	Seksi II: Helvetia-Sei Semayang	2018	PT. Utama Karya (Persero)
		Seksi III: Sei Semayang-Binjai	2018	PT. Utama Karya (Persero)
10	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi		2019	PT. Jasamarga Kualanamu Tol
11	Palembang - Indralaya	Seksi I: Palembang-Pemulutan	2018	PT. Utama Karya (Persero)
		Seksi II: Pemulutan-KTM	2019	PT. Utama Karya (Persero)
		Seksi III: KTM-Simpang Indralaya	2019	PT. Utama Karya (Persero)
12	Pandaan - Malang		2019	PT. Jasamarga Pandaan Malang
13	Pasuruan - Probolinggo	Seksi 1 : Grati-Tongas	2019	PT. Trans Jawa Paspro Jawa Tol
		Seksi 2 : Tongas-Probolinggo Barat	2019	PT. Trans Jawa Paspro Jawa Tol
		Seksi 3 : Probolinggo Barat-Probolinggo Timur	2019	PT. Trans Jawa Paspro Jawa Tol
14	Pejagan - Pematang		2018	PT. Pejagan Pematang Toll Road
15	Semarang - Solo	Seksi I : Semarang - Ungaran	2018	PT. Trans Marga Jateng
		Seksi II : Ungaran-Bawen	2018	PT. Trans Marga Jateng
		Seksi III : Bawen Salatiga	2018	PT. Trans Marga Jateng
		Seksi IV : Salatiga-Boyolali	2019	PT. Trans Marga Jateng
		Seksi V : Boyolali-Kartasura	2019	PT. Trans Marga Jateng
16	Soreang - Pasirkoja		2019	PT. Citra Marga Lintas Jabar

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Tahun Operasi	Badan Usaha Jalan Tol
17	SS Waru - Bandara Juanda		2018	PT. Citra Margatama Surabaya
18	Surabaya - Gresik		2013	PT. Margabumi Matraraya
19	Ujung Pandang	Ujung Pandang Seksi 1	2015	PT. Makassar Metro Network
		Ujung Pandang Seksi 2	2015	PT. Makassar Metro Network

- b. Pelaksanaan Serah Terima dan Serah Kelola Aset Jalan Tol
- Pembangunan jalan tol tercatat sebagai aset konsesi jasa dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Aset yang disediakan oleh mitra (Badan Usaha Jalan Tol/BUJT) dicatat dalam Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra, sedangkan aset yang disediakan oleh Pemerintah dicatat dalam Aset Konsesi Partisipasi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara atau BMN yang telah dilakukan penetapan status penggunaan, dapat dilakukan pemindahtanganan BMN untuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan aset. Dalam rangka pemindahtanganan BMN maka perlu dilakukan serah terima/kelola aset. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset Sekretariat BPJT, khususnya pengawasan penataan aset jalan tol, selama tahun 2024 telah dilaksanakan serah terima dan serah kelola aset jalan tol sebagai berikut:

Tabel 3.2.7 Ruas Tol yang telah Serah Terima dan Kelola Aset

No	Ruas Jalan Tol	Uraian	Dokumen Serah Terima/Serah Kelola
1	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	Berita Acara Serah Terima Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Zona Dukungan Konstruksi KM 144+400 – KM 169+400 (STA 3+650 – STA 28+650)) antara Badan Pengatur Jalan Tol, PT Jasamarga Semarang Batang, dan PT Utama Karya (Persero)	Nomor: BA 41.3/BM0702/BP JT/2024 Tanggal: 22 Juli 2024
2	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	Berita Acara Serah Terima Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Zona Dukungan Konstruksi KM 169+400 – KM 194+400 (STA 28+650 – STA 53+650)) antara Badan Pengatur Jalan Tol, PT Waskita Bumi Wira, dan PT Utama Karya (Persero)	Nomor: BA 24.1/BM0702/BP JT/2024 Tanggal: 3 April 2024
3	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	Berita Acara Serah Terima Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Zona Dukungan Konstruksi KM 194+400 – KM 200+434) antara Badan Pengatur Jalan Tol, PT Citra Karya Jabar Tol, dan PT Utama Karya (Persero)	Nomor: 63/BAST/TI/2024 Tanggal: 20 Desember 2024
4	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	Berita Acara Serah Terima Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Zona Dukungan Konstruksi KM 200+434 – KM 215+434) antara Badan Pengatur Jalan Tol, PT Jasamarga Japek Selatan, dan PT Utama Karya (Persero)	Nomor: BA 24.2/BM0702/BP JT/2024 Tanggal: 3 April 2024
5	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	Berita Acara Serah Terima Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Zona Dukungan Konstruksi KM 240+984 – KM 252+984) antara Badan Pengatur Jalan Tol, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, dan PT Utama Karya (Persero)	Nomor: BA 24.3/BM0702/BP JT/2024 Tanggal: 3 April 2024
6	Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Berita Acara Serah Kelola Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Seksi 1 (KM 155+200 – KM 166+600) Seksi 2 (KM 166+600 – KM 183+450) antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, PT Citra Karya Jabar Tol, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Nomor: 56.6/BAST/TI/2024 Tanggal: 24 Oktober 2024
7	Semarang – Solo	Berita Acara Serah Terima Aset Jalan Penghubung Antara Jalan Lingkar Utara Boyolali/Jalan Prof.Dr.Soeharso dengan Jalan Akses Tol Boyolali pada Ruas Jalan Tol Semarang – Solo antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan PT Trans Marga Jateng	Nomor: BA/49BM0702/BPJT/2024 Tanggal: 23 September 2024

2. Penyiapan Rekomendasi tarif dan penyesuaian:

a. Penyiapan dukungan penyusunan tarif awal

Bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Pasal 65 ayat (5) dan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, pengelompokan golongan jenis kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan tol dan besaran tarif tol awal ditetapkan oleh Menteri. Hingga saat ini, telah dilaksanakan penyiapan dukungan penyusunan tarif awal sebanyak 17 (tujuh belas) ruas Jalan Tol dan 1 (satu) ruas Jalan Tol yang masih dalam proses.

b. Penyiapan dukungan penyusunan tarif reguler

Berdasarkan Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (“UU Jalan”), Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Jalan Tol (“PP Jalan Tol”) dan PPJT, evaluasi penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Hingga saat ini, telah dilaksanakan penyiapan dukungan penyusunan tarif reguler sebanyak 10 (sepuluh) ruas Jalan Tol dan 4 (empat) ruas Jalan Tol yang sedang berproses.

c. Penyiapan dukungan penyusunan tarif non reguler

Selain itu, Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Jalan Tol (“PP Jalan Tol”), selain evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar

rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi serta terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol. Hingga saat ini, telah dilaksanakan penyiapan dukungan penyusunan tarif reguler sebanyak 16 (enam belas) ruas Jalan Tol dan 1 (satu) ruas Jalan Tol yang belum dilakukan evaluasi.

3. Pengawasan Layanan dan Sistem Pengumpulan Tol

a. Penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan

i. Pelaksanaan penyusunan Surat Keputusan Operasi Jalan Tol Sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, bahwa Tarif Tol yang besarnya tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan Tol serta merujuk pada Berdasarkan pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, bahwa pengoperasian jalan tol dilakukan setelah memenuhi laik fungsi terhadap ketentuan teknis dan administratif sebagai jalan umum dan laik fungsi terhadap ketentuan sistem jalan tol meliputi sistem pengumpulan tol dan perlengkapan sarana operasi, telah dilaksanakan pendampingan dan penyusunan Surat Keputusan Operasi untuk Jalan Tol yang telah menyelesaikan tahap uji laik fungsi dan siap untuk dioperasikan sebanyak 13 Ruas Jalan Tol.

ii. Monitoring pengoperasian Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol

a) Pelaksanaan monitoring pengoperasian dan evaluasi aset Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol Berdasarkan pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, bahwa pada jalan tol antarkota dan jalan tol perkotaan dapat disediakan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring pengoperasian dan evaluasi aset tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sesuai Permen PUPR

Nomor 28 Tahun 2021 tentang tempat istirahat dan pelayanan jalan tol dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Ruas Jalan Tol yang memiliki TIP adalah 48 ruas jalan tol dengan jumlah total TIP sebanyak 142 unit. Saat ini TIP beroperasi sebanyak 124 unit pada 34 ruas jalan tol dan sebanyak 18 unit sedang tahap konstruksi pada 9 ruas jalan tol;
 - 2) Hasil monev untuk ruas jalan tol yang memiliki kewajiban TIP sesuai PPJT sampai dengan bulan Desember 2024 diperoleh rata-rata pemenuhan fasilitas umum sesuai Permen PUPR nomor 28 tahun 2021 pada 132 unit TIP di 39 ruas jalan tol adalah sebesar 67,15%. Indikator yang banyak tidak terpenuhi adalah jumlah toilet wanita kubikal, parkir kendaraan pengangkut bahan berbahaya, toilet laki-laki kubikal dan toilet laki-laki kubikal;
 - 3) Sebagian besar BUJT yang saat ini masih belum memenuhi fasilitas sebagaimana disyaratkan dalam Permen 28 tahun 2021. BUJT diminta untuk menyampaikan secara tertulis ke BPJT dan Direktorat Jenderal Bina Marga rencana jadwal pemenuhan fasilitas secara bertahap.
- b) Monitoring kewajiban Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sesuai dengan PPJT Badan Usaha Jalan Tol.
- Berdasarkan pasal yang terdapat pada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol pada masing-masing BUJT perihal Cidera Janji Badan Usaha Jalan Tol disebutkan Badan Usaha Jalan dapat dikenai Cidera Janji Dalam Masa Konstruksi apabila BUJT gagal melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Rencana Teknik Akhir atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Ruas Jalan Tol yang memiliki kewajiban TIP sesuai PPJT adalah 29 ruas jalan tol dengan jumlah total kewajiban

sebanyak 159 unit. Saat ini TIP telah beroperasi sebanyak 70 unit di 16 ruas jalan tol dengan bentuk Kerjasama pengelolaan TIP 68 unit Built Operate Transfer (BOT) dan 2 unit Built Operate Own (BOO) serta sebanyak 15 unit sedang tahap konstruksi di 7 ruas jalan tol, pemenuhan kewajiban TIP pada masing-masing BUJT.

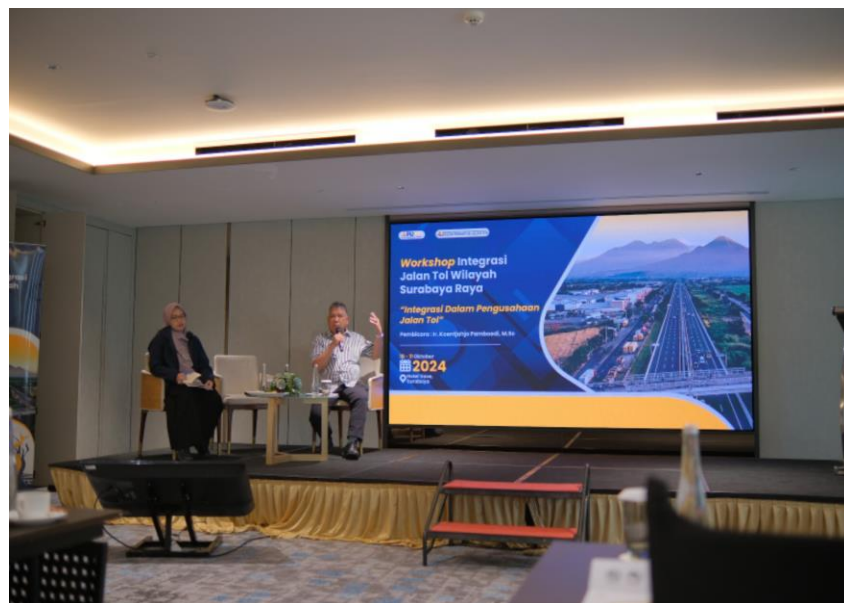
iii. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan pasal 51A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, bahwa Badan Usaha Jalan Tol yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol wajib memenuhi SPM jalan tol, SPM jalan tol sebagaimana dimaksud meliputi kondisi Jalan Tol, prasarana keselamatan dan keamanan dan prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol. Penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol, serta merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, disebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Monitoring pemenuhan SPM jalan tol pada tahun 2024 terdapat 9 ruas jalan tol yang sudah terbit rekomtek SPM.

Manfaat :

Penerima manfaat internal adalah manajemen BPJT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penataan asset dan pengelolaan PNBPN, penyiapan rekomendasi tarif dan penyesuaian, pengawasan layanan dan sistem pengumpulan tol.

Dokumentasi :



i. Kajian Integrasi Jalan Tol

Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Bidang Pemeliharaan Pemantauan Aset mempunyai tugas dan fungsi:

1. penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian tarif;
2. penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
3. penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol;
4. penyiapan dukungan pengawasan penataan aset; dan

5. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan jalan tol.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan tol, salah satunya yaitu integrasi sistem pengumpulan tol & pentarifan. Integrasi ini diperlukan untuk:

1. Mengurai kemacetan
2. Meningkatkan efisiensi waktu tempuh
3. Meningkatkan efisiensi transaksi

Saat ini telah dilakukan integrasi jalan tol pada:

1. JIUT (Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta)
2. JORR (Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta)
3. Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Cikampek Elevated

Akan dilakukan integrasi jalan tol pada jaringan jalan tol:

1. JORR 2
2. Surabaya
3. Medan

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan diantaranya:

1. Melakukan survey:
 - a. Volume lalu lintas pada jaringan jalan tol dan jaringan jalan nasional di sekitar jalan tol
 - b. Data kependudukan
 - c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat
 - d. Latar belakang perjalanan
 - e. Asal tujuan perjalanan
 - f. Waktu tempuh perjalanan
2. Melakukan analisa atas:
 - a. Laporan Keuangan masing-masing badan usaha jalan tol yang masuk dalam ruas yang akan diintegrasikan sistem pengumpulan tol & tarifnya
 - b. Laporan Pengoperasian masing-masing badan usaha jalan tol yang masuk dalam ruas yang akan diintegrasikan sistem pengumpulan tol & tarifnya (rencana pemeliharaan, volume lalu lintas, dan pendapatan tol)

3. Melakukan survey lalu lintas sehingga diperoleh data video dan data volume lalu lintas perhari.
4. Melakukan survey situasi lalu lintas dengan video drone pada jalan tol, gerbang tol, dan simpang sebidang selama 5 hari kerja dan 2 hari libur untuk masing-masing ruas.
5. melakukan kajian perhitungan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) untuk tarif jalan tol integrasi.
6. Membuat model dan skema jalan tol integrasi.
7. Melakukan analisis perhitungan tarif tol untuk integrasi.
8. melakukan kajian perhitungan evaluasi tarif tol integrasi sebagai fungsi dari sensitivitas perubahan potensi volume lalu lintas atas rencana penerapan tarif tol integrasi.
9. Melakukan kajian sistem pentarifan dan proyeksi atas volume lalu lintas realisasi pada masing-masing ruas jalan tol yang terintegrasi dan membandingkan pada perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT) untuk mengetahui pengaruh integrasi terhadap rencana usaha.
10. memberikan masukan pada penyusunan konsep prosedur atau petunjuk tahapan integrasi jalan tol.

Output Pekerjaan :

Keluaran dari pekerjaan Paket Kajian Integrasi Jalan Tol ini diantaranya adalah:

1. Laporan pendahuluan yang berisi deskripsi lokasi serta metodologi dan jadwal kerja
2. Laporan Antara
3. Laporan Bulanan
4. Laporan hasil survey kependudukan, karakteristik sosial dan ekonomi pada wilayah integrasi untuk analisa ATP dan WTP
5. Laporan hasil survey volume lalu lintas
6. Laporan hasil kajian ATP dan WTP
7. Laporan hasil kajian perhitungan tarif jalan tol integrasi
8. Laporan hasil model dan skema integrasi jalan tol
9. Laporan hasil kajian pengaruh integrasi terhadap rencana usaha
10. Dokumentasi hasil survey lalu lintas beserta video dari smart camera dan drone video
11. Ringkasan eksekutif dari semua laporan kajian dan survey

12. Laporan akhir

Manfaat :

Penerima manfaat internal dan eksternal adalah manajemen BPJT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemantauan dan Pemeliharaan Aset.

Dokumentasi :

j. Bantuan Teknis Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Aset Jalan Tol

Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Bidang Pemeliharaan Pemantauan Aset mempunyai tugas dan fungsi:

1. penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian tarif;
2. penyiapan dukungan pengawasan pemenuhan layanan;
3. penyiapan dukungan pengawasan sistem pengumpulan Tol;
4. penyiapan dukungan pengawasan penataan aset; dan
5. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perusahaan jalan tol.

Memperhatikan perubahan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan adanya bantuan teknis kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Aset Jalan Tol.

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan diantaranya:

1. Membantu dan memberikan masukan pada penyusunan konsep prosedur atau petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset (PPA).
2. Membantu dan memberikan masukan dalam kegiatan validasi atas pemenuhan SPM yang dilakukan oleh BUJT.
3. Membantu dan memberikan masukan pada pelaksanaan pemantauan terhadap pemanfaatan rumija dalam rangka pemeliharaan aset jalan tol termasuk pemanfaatan Building Information Modelling (BIM) dalam pengawasan aset.
4. Membantu dan memberikan masukan dalam penyiapan dukungan dalam rangka perizinan pemanfaatan rumija tol.
5. Membantu dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pencatatan aset konsesi jasa.

6. Membantu dan memberikan masukan dalam pelaksanaan serah terima aset.
7. Membantu dan memberikan masukan dalam penyiapan penyusunan bahan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian tarif.
8. Memberikan saran dan masukan dalam evaluasi integrasi tarif jalan tol terkait efektivitas dan efisiensi sistem pengumpulan tol, kinerja antrian, kapasitas gardu, disparitas tarif, dan distribusi lalu lintas.
9. Membantu dan memberikan masukan dalam pelaksanaan evaluasi aspek finansial atas integrasi tarif jalan tol.
10. Melakukan analisa atas Laporan Pengoperasian (rencana pemeliharaan, volume lalu lintas, penghasilan dan pendapatan tol, kecelakaan).
11. Identifikasi permasalahan terhadap kejadian khusus yang terjadi pada jalan tol yang berdampak kepada pengurangan pelayanan jalan tol.
12. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilakukan pada jalan tol yang sudah beroperasi (Jalan tol Jabodetabek, Trans Jawa, Trans Sumatera dan Non Trans).

Output Pekerjaan :

Keluaran dari pekerjaan Paket Bantuan Teknis Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Aset Jalan Tol ini diantaranya adalah antara lain:

1. Laporan pendahuluan
2. Laporan bulanan yang mencakup hal-hal di bawah ini yang merujuk pada ruang lingkup pada bab gambaran umum dan ruang lingkup di atas:
 - a. Finalisasi Draft/konsep prosedur sesuai dengan bab Gambaran Umum
 - b. Hasil inventarisasi fasilitas TIP berdasarkan Permen PUPR nomor 28 tahun 2021.
 - c. Hasil inventarisasi leger jalan dan as built drawing
 - d. Hasil evaluasi terhadap as built drawing dan leger jalan yang dilaksanakan Badan Usaha Jalan Tol berbasis Building Information Modelling (BIM).
 - e. Hasil evaluasi dan pembahasan serta pendampingan rapat dalam penyiapan penyesuaian tarif, rekomendasi tarif awal dan integrasi sistem pengumpulan Tol
 - f. Hasil monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan RUMIJA Tol mencakup:

- g. Hasil monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan aset;
 - h. Laporan monitoring pemenuhan layanan aset jalan tol;
 - i. Notulen rapat koordinasi bersama BUJT terkait data, kondisi, progres pemeliharaan dan pemenuhan layanan aset jalan tol.
 - j. Masukan atas laporan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dari BUJT.
 - k. Hasil analisis kajian kondisi jalan non tol dari simpang sebidang akses jalan tol ke simpang sebidang terdekat.
3. Ringkasan eksekutif
 4. Laporan akhir

Manfaat :

Penerima manfaat internal dan eksternal adalah manajemen BPJT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemantauan dan Pemeliharaan Aset.

Dokumentasi :



k. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF)

Manfaat Proyek :

- ✦ Menghilangkan kemacetan di gerbang tol, tidak terjadi antrean kendaraan.
- ✦ Mengurangi polusi dan emisi karbon.
- ✦ Mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka opsi seluruh instrumen pembayaran.
- ✦ Efisiensi biaya operasional pengumpulan tol oleh BUJT dengan jaminan BUJT tetap menerima 100% pendapatan tol.

Output Pekerjaan :

Telah dilaksanakan rapat pembahasan negosiasi MLFF dengan PT RITS, namun *PT RITS belum dapat memenuhi keseluruhan jadwal negosiasi yang direncanakan. Berdasarkan hasil negosiasi yang dilaksanakan PT RITS diminta untuk menyampaikan kembali proposal modifikasi yang menjustifikasi kontrak dan ketentuan teknis, serta perhitungan perkiraan perubahan biaya dan pengeluaran jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Modifikasi sebagaimana Pasal 22.1 huruf (e) dan (f) PKS MLFF.*

Hambatan :

Terjadi kemunduran jadwal pelaksanaan COD Parsial Proyek yang menyebabkan adanya kebutuhan negosiasi antara Para Pihak. PT RITS belum dapat memenuhi keseluruhan jadwal negosiasi yang direncanakan, namun berdasarkan hasil negosiasi terlaksana, PT RITS diminta untuk menyampaikan kembali proposal modifikasi yang menjustifikasi kontrak dan ketentuan teknis, serta perhitungan perkiraan perubahan biaya dan pengeluaran jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Modifikasi sebagaimana Pasal 22.1 huruf (e) dan (f) PKS MLFF, namun sampai saat ini Tim Negosiasi PT RITS baru mengirimkan proposal Draft Amandemen IV yang seharusnya dapat dilakukan setelah proposal teknis dan finansial telah disepakati sehingga Kementerian PU masih menunggu penyampaian proposal dari PT RITS.

Alternatif Solusi :

BPJT telah melakukan tindak lanjut untuk ekspose meeting BPKP dan disampaikan permohonan reviu untuk pelaksanaan implementasi proyek MLFF atas permintaan pendampingan tindak lanjut pelaksanaan implementasi proyek sistem MLFF. BPJT juga telah mengkonsepkan surat permohonan pendapat hukum dari Menteri PU kepada Jaksa Agung beserta dengan project brief MLFF dengan harapan adanya jawaban reviu dan opini hukum dari BPKP dan Jamdatun atas tindak lanjut pelaksanaan proyek MLFF.

Dokumentasi :



1. Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Self Assessment Aspek Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu fungsi BPJT adalah melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan kewajiban Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Kewajiban BUJT pada PPJT antara lain adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (SPM) seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang di luar dari SPM Jalan Tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu, BUJT berkewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment* berdasarkan SPM Jalan Tol dan melaporkannya kepada BPJT.

Sampai dengan Bulan Juli 2023, ruas jalan tol yang sudah beroperasi adalah sebanyak 72 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai \pm 2.719.91 km (tanpa suramadu).

Berdasarkan hal tersebut maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan *Self Assessment* Aspek Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Self Assessment Aspek Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol:

1. Tersedianya data hasil kajian teknis terhadap kinerja pelayanan jalan tol
2. Tersedianya Data hasil pemeriksaan lapangan, evaluasi, dan analisis terhadap pelaksanaan *Self Assessment* SPM Jalan Tol

Manfaat :

1. Mempermudah pembaharuan data pelaksanaan *Self Assessment* SPM Jalan Tol, permasalahan dan dokumentasi lapangan pada ruas jalan tol operasi
2. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring pelaksanaan *Self Assessment* SPM Jalan Tol oleh BUJT
3. Membantu BPJT dalam melakukan evaluasi terhadap pemenuhan *Self Assessment* SPM Jalan Tol oleh BUJT
4. Tersedianya data *Self Assessment* SPM Jalan Tol yang valid

Hambatan :

Terdapat gangguan pada server PDN yang mempengaruhi pengumpulan data terkait self assessment oleh BUJT dan juga input data oleh Konsultan melalui aplikasi dan website e-spm.

Alternatif Solusi :

Konsultan beserta BUJT melakukan pendokumentasian terkait temuan dan tindak lanjut self assessment dengan cara input manual melalui tabel serta mengirimkannya kepada BPJT melalui email.

Dokumentasi :





m. Project Management Office Pengelolaan Data Informasi Dan Fasilitasi Layanan Operasi Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan evaluasi layanan operasi jalan tol, fasilitasi dan koordinasi terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian sesuai perjanjian perusahaan jalan tol, evaluasi terhadap kepuasan pengguna jalan tol, dan evaluasi keselamatan jalan tol.

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol juga mengatur pengawasan umum jalan tol serta perusahaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol secara umum dan memastikan pelayanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Sampai dengan Bulan September 2023, ruas jalan tol yang sudah beroperasi adalah sebanyak 72 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai $\pm 2.772,78$ km (tanpa suramadu).

Dalam hal pelaksanaan monitoring layanan operasi jalan tol, BPJT membutuhkan dukungan pelaksanaan tugas-tugas yang setidaknya meliputi kegiatan operasi jalan tol, peningkatan kualitas jalan tol, evaluasi laik fungsi jalan, evaluasi lalu lintas, pendapatan, dan keselamatan jalan tol. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan monitoring yang dilakukan dapat dilakukan secara efektif dan optimal.

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari *Project Management Office* Pengelolaan Data Informasi Dan Fasilitasi Layanan Operasi Jalan Tol:

1. Tersedianya data rekapitulasi dan pengelolaan terhadap data monitoring pengoperasian pada setiap jalan tol yang meliputi;
 - a. Volume lalu lintas transaksi tol.
 - b. Keselamatan jalan tol.
 - c. Laporan Triwulan BUJT tentang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol
 - d. Fasilitas Layanan TIP
 - e. Monitoring program peningkatan kualitas dan estetika jalan tol.
 - f. Monitoring kejadian khusus dan penanganannya.
2. Laporan monitoring program peningkatan kualitas dan estetika jalan tol
3. Laporan Kejadian Khusus dan Penanganannya
4. Rekapitulasi terhadap kegiatan pengoperasian jalan tol
5. Tersedianya data dan informasi dalam website, mobile application BPJT INFO, sosial media dan SIGI PUPR
6. Update data dan informasi pada website, sistem/aplikasi dan media sosial yang ada di lingkungan BPJT
7. Update aplikasi tarif tol BPJT baik dalam web-base dan mobile application BPJT info berbasis Android dan IOS
8. Pencegahan dan perbaikan sistem yang ada di lingkungan BPJT dari serangan siber
9. Integrasi data pengoperasian CCTV BUJT baik di website dan mobile application BPJT INFO
10. Tersedianya data dan fitur tempat istirahat dan pelayanan (TIP) di jalan tol termasuk tenant dan UMKM di mobile application BPJT INFO

Manfaat :

1. Membantu BPJT dalam mengelola dan memutakhirkan data dengan baik dan *up to date* pada seluruh media dan sistem aplikasi lainnya yang dimiliki BPJT sehingga dapat memberikan data mengenai jalan tol yang terkini kepada pimpinan, stakeholders internal maupun eksternal.
2. Membantu BPJT dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat dan monitoring media.
3. Membantu BPJT dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban BUJT pada pelaksanaan pengoperasian jalan tol selama masa konsesi
4. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring pelaksanaan pengoperasian jalan tol oleh BUJT.

5. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring pelayanan dan fasilitas pada tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Jalan Tol.
6. Membantu BPJT dalam melakukan pengelolaan data pengoperasian jalan tol dan informasi publik.
7. Membantu BPJT dalam melakukan monitoring kejadian khusus pada jalan tol operasi
8. membantu BPJT dalam melakukan monitoring program peningkatan kualitas dan estetika jalan tol.
9. Membantu BPJT dalam melakukan evaluasi data lalu lintas, Keselamatan jalan tol, serta aspek operasi lainnya.

Dokumentasi :



n. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol, dan pemantauan operasi.

Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol juga mengatur pengawasan umum jalan tol serta perusahaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jalan tol secara umum dan memastikan pelayanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Sebagaimana siklus perusahaan jalan tol yang ada saat ini, pihak yang terlibat bukan hanya BPJT sendiri, namun juga Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Badan Usaha Jalan Tol, ataupun instansi terkait lainnya yang bersinggungan langsung dengan proses penyelenggaraan jalan tol.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJT perlu mengembangkan sistem. Mengingat sistem yang dimiliki saat ini masih berdiri sendiri, untuk itu diperlukan Sistem informasi baru agar dapat dimanfaatkan dengan secara maksimal dan optimal oleh BPJT, BUJT, Instansi terkait, dan Masyarakat. Melihat tugas dan fungsi BPJT baru, yang salah satunya sebagai pengelola data dan sistem informasi, dan juga kebutuhan dan jumlah data yang dinamis, maka diperlukan satu sistem informasi terpadu yang mencakup keseluruhan proses perusahaan jalan tol di Indonesia dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dalam prosesnya.

informasi yang memudahkan untuk melakukan monitoring bisnis proses perusahaan jalan tol. Sehingga itu diperlukan sebuah sistem yang dapat menampilkan informasi yang dapat mendukung seluruh proses bisnis didalam BPJT yang bertajuk SIMJT (Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol) yang didalamnya terdapat modul, antara lain:

1. Pra Perencanaan
2. Desain dan konstruksi jalan tol
3. Data investasi jalan tol
4. Pendanaan jalan tol
5. Pelaksanaan pembangunan tol
6. Pengawasan Pembangunan Tol
7. Pengujian Jalan Tol
8. Performa Jalan Tol
9. Data analisis seperti: pengolahan data Lalin, pendapatan, kecelakaan, Deterioration Model, dan lain sebagainya.

Mengingat sistem yang dimiliki saat ini masih berdiri sendiri, untuk itu diperlukan Sistem informasi baru agar dapat dimanfaatkan dengan secara maksimal dan optimal oleh BPJT, BUJT, Instansi terkait, dan Masyarakat. Melihat tugas dan fungsi BPJT baru, yang salah satunya

sebagai pengelola data dan sistem informasi, dan juga kebutuhan dan jumlah data yang dinamis, maka diperlukan satu sistem informasi terpadu yang mencakup keseluruhan proses pengusahaan jalan tol di Indonesia dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dalam prosesnya.

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol:

1. Proses Bisnis yang berjalan sudah tergambar pada SRS
2. Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol berbasis Microservice
3. manual pedoman penggunaan atau pengoperasian dan pemeliharaan sistem
4. Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol
5. Handover Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol, termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, *data base*, dokumen *user manual*

Manfaat :

Membantu melaksanakan fungsi Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yaitu mengelola data dan sistem informasi layanan jalan tol Melakukan perancangan dan pengintegrasian data pada sistem informasi bidang – bidang di BPJT menjadi satu sistem informasi terpadu.

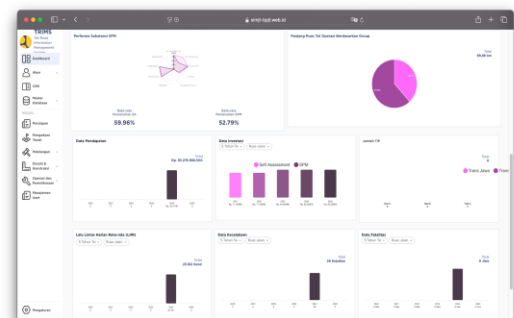
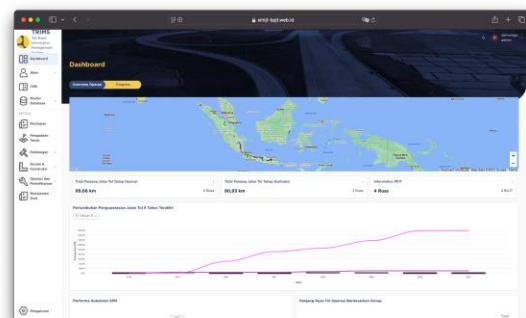
Hambatan :

1. Belum tersedianya server PDN

Alternatif Solusi :

1. Menyediakan server development selama masa pembangunan dan pemeliharaan sebelum masuk ke server PDN

Dokumentasi :





o. Pengelolaan Data Dan Pemantauan Layanan Jalan Tol

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi Perusahaan jalan tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, dibentuk Sekretariat BPJT yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT yang terdiri dari 3 bidang, diantaranya Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi layanan Jalan Tol dan pemantauan operasi.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol , dipandang perlu disusun kegiatan monitoring pemantauan jalan tol operasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Jalan Tol serta penyebarluasan informasi jalan tol kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik.

Output Pekerjaan :

Terselenggaranya kegiatan pengelolaan data dan pemantauan layanan jalan tol serta penyebarluasan informasi jalan tol kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik.

Manfaat :

1. Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data penyelenggaraan jalan tol (data investasi, data teknis dan data operasi);
2. Tersedianya informasi penyelenggaraan jalan tol, koordinasi layanan pengaduan, sarana dan prasarana penyampaian informasi publik;
3. Terlaksananya dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
4. Terlaksananya evaluasi layanan operasi jalan tol;

5. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
6. Pemantauan kesiapan jalan tol operasi dalam mendukung pelaksanaan jalur lebaran, hari – hari besar keagamaan dan libur lainnya.

Hambatan :

Kebijakan pengurangan anggaran perjalanan dinas mengakibatkan monev tinjauan lapangan diundur di tahun 2025

Alternatif Solusi :

Penyusunan kegiatan rutin dan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan sesuai tugas serta menyesuaikan dengan anggaran

Dokumentasi :



p. Bantuan Dukungan Persiapan Dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah

dalam menyelenggarakan Jalan Tol yang meliputi, perusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat, dalam melaksanakan tugasnya, BPJT menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pengadaan investasi Jalan Tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
2. Merekomendasikan kepada Menteri untuk tarif awal dan penyesuaian tarif Tol;
3. Merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak perusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya dan pengoperasian;
4. Merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak sementara perusahaan Jalan Tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya; dan
5. Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan kewajiban perusahaan Jalan Tol dalam melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Salah satu kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Penjelasan :

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana terakhir diubah yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 06 tahun 2023. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi perusahaan Jalan Tol untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan dukungan

pelaksanaan operasional di bidang pengadaan investasi, pengawasan pengadaan tanah yang berasal dari Badan Usaha, pengusulan rencana usaha dan perubahannya, penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen, pengawasan pengusahaan Jalan Tol , serta rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan dukungan pelaksanaan operasional di bidang pendanaan investasi;
- b. Penyesuaian dukungan pengawasan pendanaan tanah yang berasal dari Badan Usaha;
- c. Penyiapan dukungan pengusulan rencana usaha dan perubahannya;
- d. Penyiapan dukungan penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen;
- e. Penyiapan dukungan pengawasan pengusahaan Jalan Tol;
- f. Penyusunan analisis rekomendasi penyiapan pengambilalihan Konsesi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2024 BPJT memerlukan Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan penyiapan dan pengawasan pengusahaan jalan tol dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Output Pekerjaan :

Hasil kegiatan dari Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol :

- a. Terlaksananya dokumen manajemen yang mencakup monitoring dan permasalahan jalan tol, pelayanan dan pengawasan pengusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.
- b. Terlaksananya penyiapan, pelayanan dan pengawasan pengusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.

Manfaat :

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung penyiapan dan pengawasan pengusahaan jalan tol, meliputi :

- a. Mendukung kinerja BPJT dalam proses pelelangan pengusahaan jalan tol.
- b. Melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi pengusahaan jalan tol pada ruas-ruas yang telah memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), termasuk melakukan analisis laporan keuangan yang meliputi diantaranya analisis pendapatan tol, biaya O&M, pengembalian pinjaman.

- c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis finansial atau review Business Plan karena adanya rencana/ usulan perubahan PPJT.
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan analisa/ kajian finansial karena adanya usulan dan/atau perubahan susunan pemegang saham.
- e. Membantu evaluasi terhadap usulan ruas jalan tol, baik dari aspek legal, dan teknis.
- f. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis lalu lintas yang diperlukan dalam review Business Plan jalan tol solicited maupun unsolicited baik yang telah memiliki PPJT maupun sedang dalam tahap persiapan.
- g. Melakukan penataan dokumen fisik perusahaan jalan tol yang terdapat di Bidang Investasi dan menjadikan dokumen elektronik dengan melakukan scanning terhadap seluruh dokumen hardcopy sehingga dapat diarsipkan secara elektronik. Hal ini membantu permasalahan keterbatasan ruang arsip di Bidang Investasi Sekretariat BPJT.

Dokumentasi :



q. Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi pelaksanaan pengadaan investasi, penyiapan perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan amandemen, dan penyiapan rekomendasi pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya;
2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah serta pengawasan dan pengusahaan Jalan Tol;
3. Penyiapan rekomendasi tarif awal dan penyesuaian, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemenuhan layanan dan sistem pengumpulan Tol;
4. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan penataan aset dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pengusahaan Jalan Tol;
5. Pengelolaan sistem informasi layanan Jalan Tol;
6. Fasilitasi dan koordinasi pemantauan operasi; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat.

Salah satu kegiatan swakelola dilaksanakan oleh Bidang Investasi Jalan Tol adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol serta pengawasan jalan tol.

Penjelasan :

Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol adalah kegiatan Swakelola yang ada di bidang investasi mencakup lelang jalan tol, monitoring dan evaluasi, dan evaluasi terhadap rencana usaha yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

Pada tahun 2024, kegiatan evaluasi perubahan rencana usaha yang merupakan bagian dari *business as usual* tugas dan fungsi bidang Investasi BPJT dilakukan pada beberapa ruas jalan tol. Evaluasi perubahan rencana usaha adalah proses telaahan *business plan* dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh BUJT sebagai bukti yang bisa diakui untuk mendapatkan kompensasi atas adanya perubahan lingkup atas permintaan pemerintah. Selain evaluasi perubahan rencana, Bidang Investasi juga mendampingi BPKP dalam melaksanakan verifikasi atas penetapan perubahan rencana usaha.

Tabel 3.2.8 Perubahan Rencana Usaha Jalan Tol

Perubahan Rencana Usaha	BPKP
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi *	Jakarta-Cikampek **
Batang-Semarang *	Jakarta-Cikampek II Elevated **
Manado-Bitung *	6 Ruas jalan Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I: Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang **
Serpong-Balaraja *	Ciawi-Sukabumi **
	Binjai-Langsa **
	Serpong-Cinere **
	Sigli-Banda Aceh **
	Binjai-Langsa **
	Indrapura-Kisaran **
	Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Prapat **
	Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu **
	Palembang-Simpang Indralaya **
	Pekanbaru-Dumai **
	Pekanbaru-Padang **
	Sigli-Banda Aceh **
	Simpang Indralaya-Muara Enim **

Catatan: * *Belum Terbit Surat Menteri*
** *Sudah Terbit Surat Menteri*

Status Pelelangan Pengusahaan Jalan tol 2024

Berikut adalah ruas-ruas yang dilelang pada tahun 2024 beserta statusnya progresnya:

Tabel 3.2.9 Ruas Yang dilelang Pada Tahun 2024

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)	Status
1	Bogor-Serpong (via Parung)	31,12	Persiapan Penandatanganan PPJT setelah Penerbitan SKKL
2	Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis	108,30	Evaluasi readiness criteria persiapan lelang ulang
3	Gilimanuk-Mengwi	96,84	Pelelangan Ulang

Tabel 3.2.10 Tabel Nilai Investasi Perusahaan Jalan Tol

Sub Kategori	Unit	Baseline Des 2021	Akhir 2022	Akhir 2023	Akhir 2024
Nilai Investasi (Triliun)	Rupiah (Triliun)	736,37	794,85	724,95*)	767,69
Foreign Direct Investment*)	Rupiah (Triliun)	9,90 T 1,34%	9,90 T 1,25%	12,0T 1,66%	12,0 T 1,35%
Pembiayaan Internasional	Rupiah (Triliun)	3,89 T 0,53%	4,29 T 0,54%	4,68 T 0,65%	4,29T 0,56%
Pembiayaan Bank BUMN*)	Rupiah (Triliun)	67,89 T** 9,22%	84,56 T 10,64%	104,30 T 11,72%	76,1 T 9,91%
Pembiayaan Non Bank BUMN*)	Rupiah (Triliun)	97,65 T 13,26%	123,0 T 15,47%	123,45T 17,03%	113,2 T 14,75%

*) Nilai investasi pada tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan adanya koreksi hasil revidi BPKP dan pengakhiran PPJT ruas gilimanuk-mengwi dan gedebage-tasikmalaya-cilacap

**) Terhadap total ekuitas dan pinjaman

Output Pekerjaan : Laporan Akhir

Manfaat :

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

Dokumentasi :



r. Kajian Ability-To-Pay (ATP) Dan Willingness-To-Pay (WTP) Pada Beberapa Ruas Jalan Tol

Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 2/2002 tentang perubahan kedua atas UU 38/2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan (BKBOK) dan kelayakan investasi. Kemampuan bayar pengguna tol diwujudkan dalam *Ability-to-Pay* (ATP)/Kemampuan Membayar dan *Willingness-to-Pay* (WTP)/Kemauan Membayar. WTP pengguna jalan tol merupakan tingkat harga atau tarif tol di mana pengguna jalan bersedia membayar penggunaan jasa pelayanan jalan tol, sedangkan ATP mencerminkan besaran harga yang dapat dibayarkan pengguna setelah memperhitungkan pendapatan dan biaya transportasi yang dikeluarkan pengguna jalan.

UU No. 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol menyebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi BPJT adalah merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri. Dalam rangka melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan terkait perhitungan tarif tol, diperlukan kajian

untuk menentukan besaran ATP dan WTP jalan tol yang telah dan belum beroperasi sebagai bahan untuk mengevaluasi besaran tarif tol.

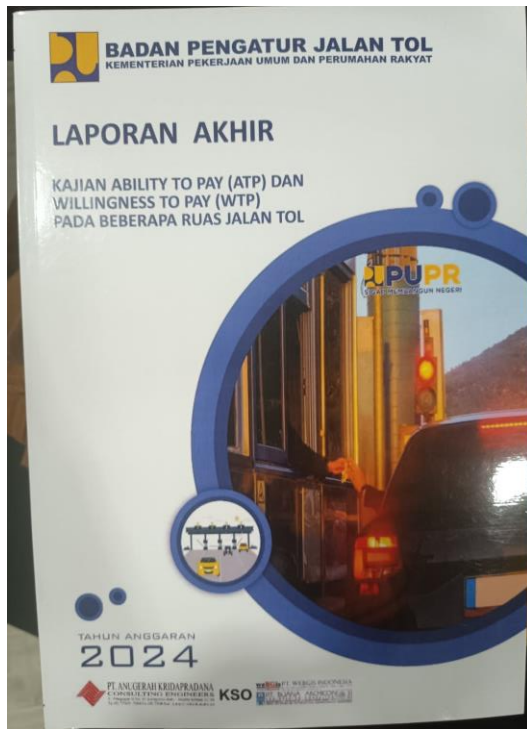
Output Pekerjaan :

Laporan Kajian ATP dan WTP pada Beberapa Ruas Jalan Tol

Manfaat :

Tersedianya data ATP dan WTP Jalan Tol Konstruksi dan Operasi Sebagian.

Dokumentasi :



2. Layanan Umum

Tabel 3.2.11 Capaian kinerja Output Layanan Umum

NO.	OUTPUT/ SUB KOMPONEN	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
EBA 962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	100	100
AH	Administrasi Kegiatan	Bulan	12	12	12	100	100

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan layanan umum adalah 100.00% dengan target 1 Layanan. komponen kegiatan yang menjadi indikator pendukung tercapainya indikator kinerja output layanan umum adalah kegiatan administrasi kegiatan.

3. Layanan Perkantoran

Tabel 3.2.12 Capaian kinerja Output Layanan Perkantoran

NO.	OUTPUT/ SUB KOMPONEN	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100	100
A	Pembayaran Gaji dan tunjangan	Bulan	12	12	12	100	100
FA	Pembayaran Gaji dan tunjangan	Bulan	12	12	12	100	100
FB	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Bulan	12	12	12	62,21	62,21
FC	Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	Bulan	12	12	12	100	100

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran adalah 100.00% dengan target 1 Layanan. untuk mencapai target kinerja layanan perkantoran didukung dengan komponen kegiatan dalam rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Gaji yang mencakup penggajian seluruh pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Tunjangan kinerja dan honor kepala BPJT selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan, capaian sebesar 62,21%, tidak tercapai 100% di sebabkan oleh kegiatan sewa kendaraan yang tidak bisa terlaksana dan honor operasional satuan kerja. output ini merupakan kegiatan rutin seperti Rapat, biaya servis, kebutuhan perkantoran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol.

4. Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif

Kegiatan Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan pembayaran gaji seluruh pegawai Non PNS Pendukung dan Substantif di Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol.

4. Layanan Sarana Internal

Tabel 3.2.13 Capaian kinerja Output Layanan Sarana Internal

NO.	OUTPUT/SUB KOMPONEN	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	56	56	56	100	100
GA	Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi	Unit	43	56	56	100	100
HA	Fasilitas Perkantoran	Unit	13	13	13	100	100

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan layanan sarana internal adalah 100.00% dengan target 56 Unit. Output pada layanan sarana internal yaitu pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Fasilitas Perkantoran. Tercapainya layanan sarana internal di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.

Dokumentasi :

Pangadaan Sub Bagian Tata Usaha



Pangadaan Bidang PPA





3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Unit Kerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Pengatur Jalan Tol.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Tabel Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja periode 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2020-2024

NO	IKSP	SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional																	
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional																	
Parameter	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	KM	338,41	246,12	72,73	346,15	122,84	35,49	262,8	142,11	54	282,43	240,13	85,02	194,88	184,73	94,79
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya																	
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR																	
Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	-	-	-	-	-	100,00	99,92	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2024

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Non Fisik																	
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1.00	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Layanan Umum	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	100.00
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
5	Layanan Sarana Internal	Unit	-	-	-	73	69	93.96	43	39	90.75	52	52	100.00	56	56	100.00
6	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekom. Kebijakan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA					100.00			98.79			98.15			100.00			100.00

Tabel 3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2024

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024			CAPAIAN	KET	
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	KUMULATIF		
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional													
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional													
Indikator Kinerja Kegiatan													
1	ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekom. Kebijakan	-	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	5,00	
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR													
Indikator Kinerja Kegiatan													
1	951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	
2	970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	
3	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
4	EBA994	Layanan Perkantoran	Layanan	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	5,00	
5	EAD 002	Layanan Sarana Internal	unit	-	-	69	43	52	-	56	56	220	

Dilihat dari tabel diatas, untuk output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol mencapai target PK yaitu 1 rekomendasi Kebijakan dan untuk output yang termasuk didalam “Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR” mencapai target yaitu Layanan Umum 1 Layanan, Layanan Perkantoran 1 Layanan dan Layanan Sarana Internal 56 Unit namun tidak dapat dibandingkan dengan renstra karena adanya perbedaan output antara Renstra dan Perjanjian Kinerja.

3.3.1 Perbandingan Capaian IKSP dengan Instansi Lain

Adapun Perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasarapn program (IKSP) dengan Instansi lain yang sejenis yaitu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan Direktorat Jalan Bebas Hambatan dpat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.4 Perbandingan Capaian IKSP dengan Instansi Lain

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM IKSP	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Sekretariat BPJT		Direktorat JBH	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					
<i>Parameter</i>	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	184.73 Km	94.79 %	184.73 Km	94.79 %
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		100	100 %	98.91 %	98.91 %

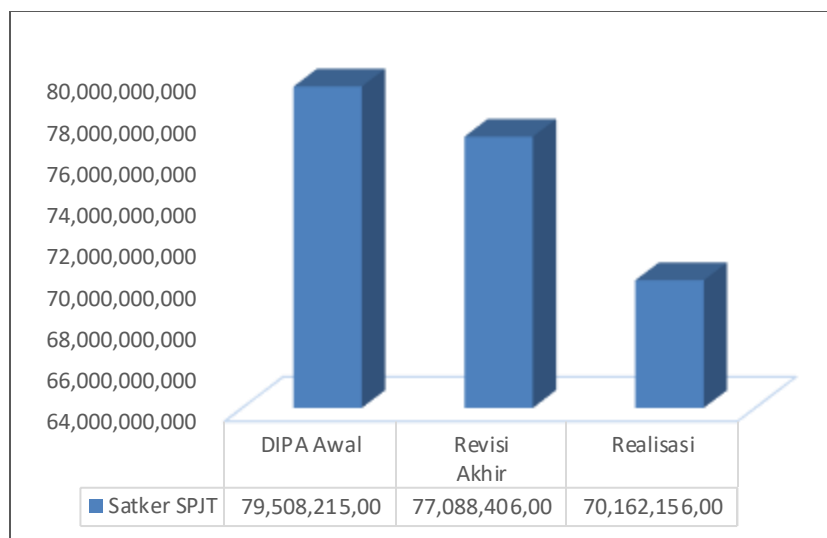
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program kedua unit organisasi mencapai 94,79% untuk IKSP Tingkat Aksesibilitas jalan Nasional dengan parameter panjang jalan tol yang beroperasi 184,73 Km.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- ✚ DIPA awal dari Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar **Rp79.508.215.000,-**.



Gambar 3.4.1 Kronologis DIPA Satker Sekretariat BPJT

Kronologis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol memiliki anggaran DIPA Awal sebesar Rp. 79.508.215.000 dan mengalami revisi akhir pada tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp.77.088.406.000 dengan realisasi akhir Rp.70.162.156.000.,

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melakukan 7 (tujuh) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2024

NO	Uraian	DIGITAL STAMP	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
NOMOR: DIPA-033.04.1.498721/2023						
1	DIPA Awal	DS:3575-9988-6238-9843	24 November 2023	79.508.215.000	-	
2	Revisi 1	DS:3575-9988-6238-9843	05 Juni 2024	79.508.215.000	79.508.215.000	Pergesaran Anggaran antar jenis belanja dan Pemutakhiran RPD Hal III
3	Revisi 2	DS:3575-9988-6238-9843	08 Agustus 2024	79.508.215.000	79.508.215.000	Revisi anggaran pemanfaatan sisa lelang
4	Revisi 3	DS:3575-9988-6238-9843	19 September 2024	79.508.215.000	79.508.215.000	Revisi anggaran pemenuhan belanja pegawai operasional dalam hal pagu tetap
5	Revisi 4	DS:9702-9972-5405-9496	15 Oktober 2024	79.508.215.000	79.322.523.000	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Revisi anggaran tidak terserap (mengurangi) pada program Infrastruktur Konektivitas ✚ Penambahan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 264.586.000, untuk pemenuhan belanja modal dan pemeliharaan
6	Revisi 5	DS:7059-7778-0063-1303	20 November 2023	79.322.523.000	79.322.523.000	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Revisi anggaran dalam rangka efisiensi belanja perjalanan dinas (blokir)

NO	Uraian	DIGITAL STAMP	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA (Rp)		ALASAN / PENYEBAB REVISI
				SEMULA	MENJADI	
7	Revisi 6	DS:7059-7778-0063-1303	28 November 2024	79.322.523.000	79.322.523.000	Revisi anggaran pemenuhan belanja pegawai operasional dalam hal pagu tetap
8	Revisi 7	DS:9007-2029-4055-8069	19 Desember 2024	79.322.523.000	77.088.406.000	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Revisi anggaran tidak terserap (mengurangi) pada program Infrastruktur Konektivitas ✚ Revisi anggaran pemenuhan gaji non pns

Issue terkait Perubahan Anggaran pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol:

1. Revisi anggaran tidak terserap (mengurangi) pada program Infrastruktur Konektivitas
2. Penambahan Anggaran pada Program Dukungan Manajemen untuk pemenuhan belanja modal dan pemeliharaan
3. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA. 2024.

Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs www.iemon.pu.go.id adalah Rp. 77.088.406.000.-

3.4.2 Realisasi Anggaran TA. 2024

Realisasi keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2024 adalah Rp.70.162.156.000 dari pagu total Rp.77.088.406.000 realisasi tersebut mencapai persentase 91,02% dengan kinerja fisik mencapai perentase 92,02% dan nilai efisiensi sebesar 101,10% dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2024

No	Program	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fis.	
1	Program Infrastruktur Konektivitas	59,017,553	53,546,336	90,73	91,55	100,90
2	Program Dukungan Manajemen	18,070,853	16,721,043	92,53	93,56	101,75
TOTAL		77,088,406	70,162,156	91.02	92.02	101.10

Sumber : i-emonitoring 31 Desember 2024

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Pagu Anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dengan rincian sebaga berikut:

Tabel 3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2024		
		Pagu (Rp ribu)	Realisasi		Pagu (Rp ribu)	Realisasi	
			Rp ribu	%		Rp ribu	%
1	IKSP: Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
	IKK: Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan						
	Parameter: Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi						
	Rincian Output						
	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	60,888,368	56,798,769	93.28	59,017,553	53,546,336	90.73
2	IKSP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
	IKK: Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan						
	Parameter: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
	Rincian Output						
	EBA 962 Layanan Umum				1,832,614	1,627,390	88.8
	EBA 962 Layanan Perkantoran	14,718,905	12,741,526	86.57	14,884,229	13,655,897	91.75
	EBA 951 Layanan Sarana Internal	1,624,807	1,482,751	91.26	1,354,010	1,332,532	98.41
TOTAL		77,232,080	71,023,046	91.96	77,088,406	70,162,155	91.02

3.4.4 Isu Terkait Program dan Anggaran TA. 2024

Di penghujung tahun anggaran terdapat kebijakan Presiden melalui Menteri Keuangan terkait efisiensi belanja akhir tahun anggaran 2024 dalam bentuk penghematan sisa pagu perjalanan dinas, kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tertuang pada surat edaran Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 Hal: Langkah – Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

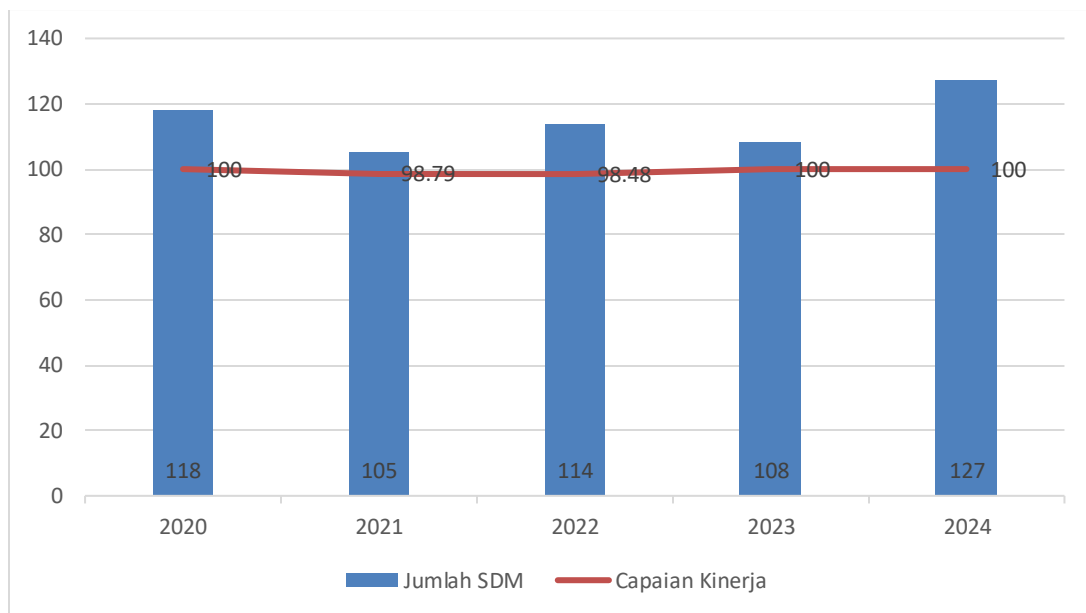
Menindaklanjuti surat edaran tersebut Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan surat yang ditujukan ke para Direktur; Kepala BBPJN/BPJN; dan Kepala Satuan Kerja Pusat bernomor PR0201-Db/1279 tanggal 12 November 2024 Hal: Penetapan Besaran Optimalisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas TA. 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan target penghematan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp7.382.323.000, untuk Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol target penghematannya sebesar Rp.418.730.000 . Namun kebijakan ini tidak berdampak pada capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2020 memiliki 118 orang pegawai, dengan jumlah PNS sebanyak 69 orang dan sebanyak 39 orang berstatus Non PNS; pada tahun 2021 memiliki 105 orang pegawai dengan jumlah PNS sebanyak 68 orang dan sebanyak 37 orang berstatus Non PNS; pada tahun 2022 memiliki 114 orang pegawai dengan komposisi PNS sebanyak 71 orang dan Non PNS sebanyak 33 orang dan pada tahun 2023 memiliki 108 orang pegawai dengan komposisi PNS sebanyak 52 orang, PPPK sebanyak 6 orang, Non PNS sebanyak 37 orang dan KI sebanyak 13 orang; dan pada tahun 2024 memiliki 127 orang pegawai dengan komposisi PNS sebanyak 51 orang, PPPK sebanyak 15 orang, Non PNS sebanyak 34 orang dan KI sebanyak 27 orang.

Tabel 3.5.1 Perbandingan Sumber Daya Manusia dan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020 - 2024

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	Alokasi Anggaran (Rp Ribu)	Realisasi Anggaran (Rp Ribu)	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020	118	837,098,716	823,419,497	100.00
2021	105	741,464,641	732,639,968	98.79
2022	114	289,808,558	285,139,588	98.48
2023	108	77,232,080	71,023,045	100.00
2024	127	77,088,406	70,162,156	100.00



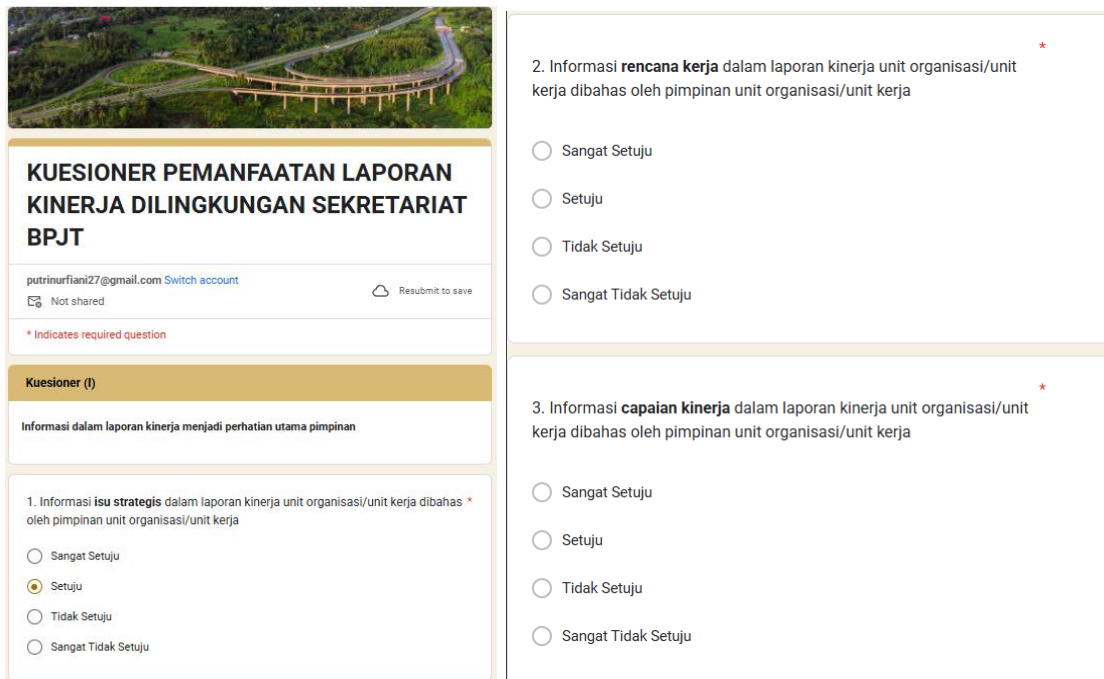
Gambar 3.5.1 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Dengan adanya dukungan sumber daya manusia sebanyak 127 orang dan efisiensi anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 70.162.156.000 atau sebesar 91,02%.

3.6 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan kualitas atas Laporan Kinerja dapat dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol.

Berikut adalah bukti dokumentasi pengisian kuesioner terkait pemanfaatan Laporan Kinerja.



KUESIONER PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BPJT

putrinurfiani27@gmail.com [Switch account](#)
Not shared [Resubmit to save](#)

* Indicates required question

Kuesioner (1)

Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan

1. Informasi **isu strategis** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas * oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rencana kerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

3. Informasi **capaian kinerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *

Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

<p>3. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>Kuesioner (II)</p>
<p>4. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai</p> <p>1. Saya mengetahui informasi isu strategis unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>
<p>5. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>2. Saya mengetahui informasi rencana kerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>
<p>3. Saya mengetahui informasi capaian kinerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	
<p>4. Saya mengetahui informasi realisasi anggaran unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>6. Saya mengetahui informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>
<p>5. Saya mengetahui informasi permasalahan dan rekomendasi unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p>	<p>7. Saya mengetahui informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja *</p> <p><input type="radio"/> Sangat Setuju</p> <p><input type="radio"/> Setuju</p> <p><input type="radio"/> Tidak Setuju</p> <p><input type="radio"/> Sangat Tidak Setuju</p> <p>Back Next Clear form</p>

Kuesioner (III)

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

1. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (IV)

Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja

1. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

3. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju

3. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

4. **Laporan kinerja periode sebelumnya** menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

4. **Laporan kinerja periode sebelumnya** menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (V)

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

1. Informasi **isu strategis** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rencana kerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
 Setuju
 Tidak Setuju
 Sangat Tidak Setuju

3. Informasi **capaian kinerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

4. Informasi **realisasi anggaran** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

5. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

6. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

7. Informasi **deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

8. Laporan **kinerja periode sebelumnya** dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja *

- Sangat Setuju
- Setuju
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (VI)

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

1. Informasi **isu strategis** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rencana kerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

3. Informasi **capaian kinerja** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

4. Informasi **realisasi anggaran** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

5. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

6. Informasi **kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7. Informasi **deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan** dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

8. Informasi **permasalahan dan rekomendasi** dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Kuesioner (VII)

Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

1. Informasi **permasalahan dan laporan kinerja** menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

2. Informasi **rekomendasi dalam laporan kinerja** menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi *

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

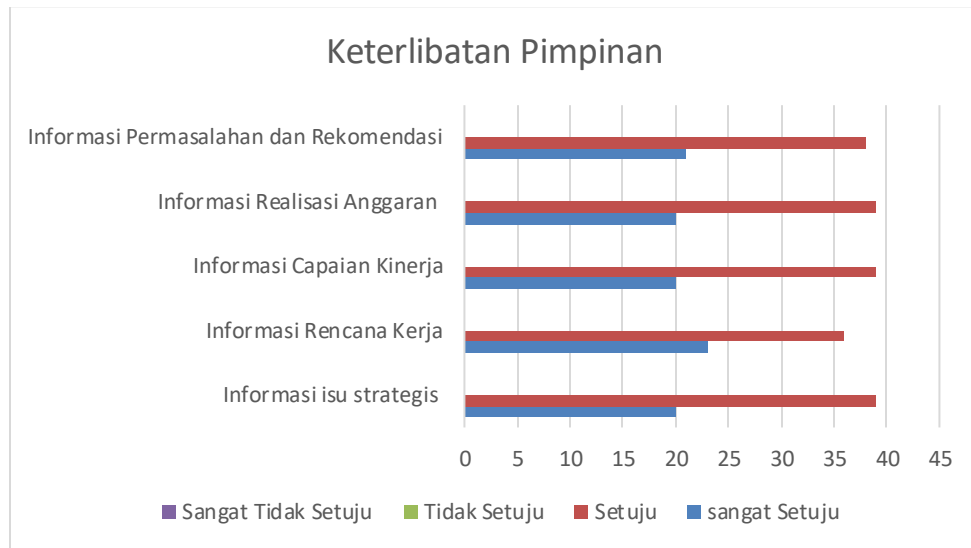
Sangat Tidak Setuju

Back
Submit
Clear form

Gambar 3.6.1 Kuesioner Pemanfaatan Laporan Kinerja

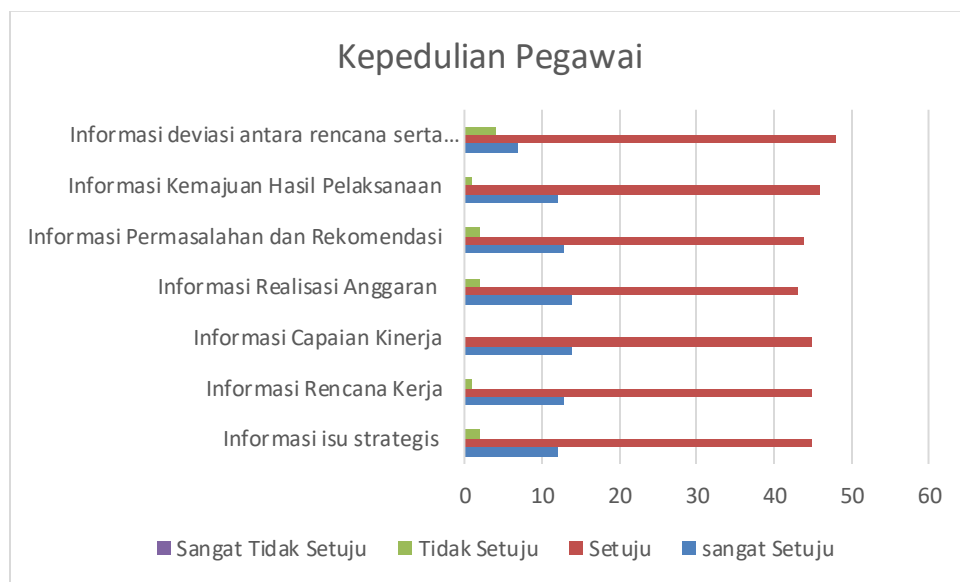
Dari hasil pengumpulan data Pengisian Kuesioner Pemanfaatan Laporan Kinerja Unit Kerja/Satker2024 pada link bit.ly/KuesionerPemanfaatanLaporanKinerja, terdapat 60 koresponden di Lingkungan Sekretariat BPJT telah mengisi form kuesioner. Kuesioner berisikan variabel-variabel, diantaranya Keterlibatan Pimpinan, Kepedulian Pegawai, Penyesuaian Aktivitas, Penyesuaian Anggaran, Evaluasi Keberhasilan Kinerja, Penyesuaian Perencanaan Kinerja, dan Perubahan Budaya Kerja yang dijabarkan dalam gambar dibawah ini:

1. Informasi dalam Laporan Kinerja menjadi perhatian utama pimpinan.



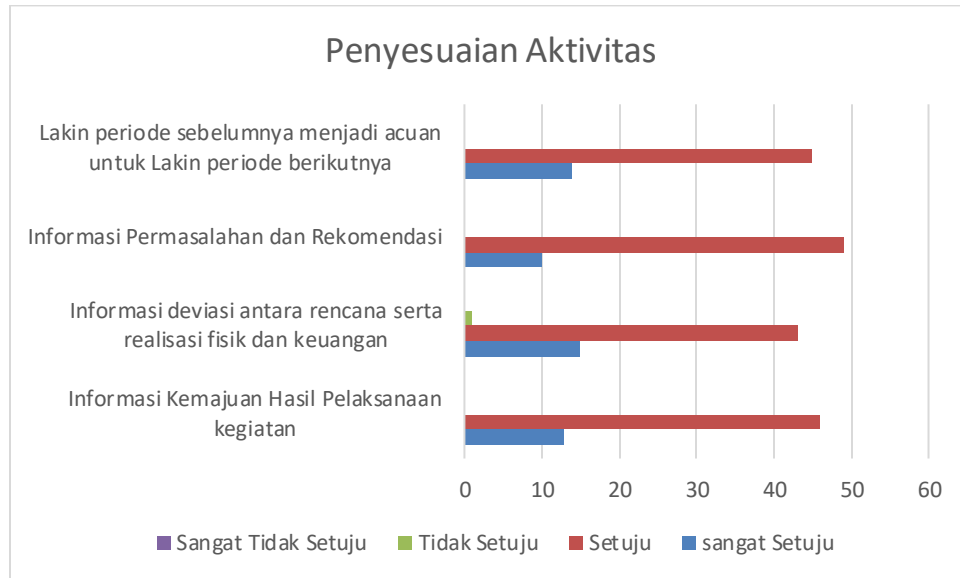
Gambar 3.6.2 Keterlibatan pimpinan dalam Lakin

2. Informasi dalam Laporan Kinerja menajadi kepedulian seluruh pegawai



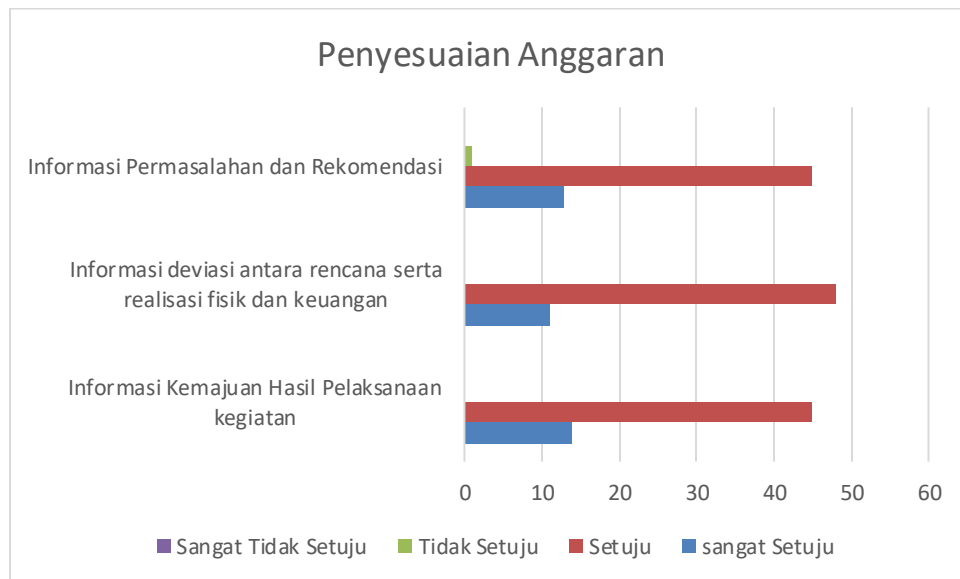
Gambar 3.6.3 Kepedulian Pegawai dalam Lakin

3. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja



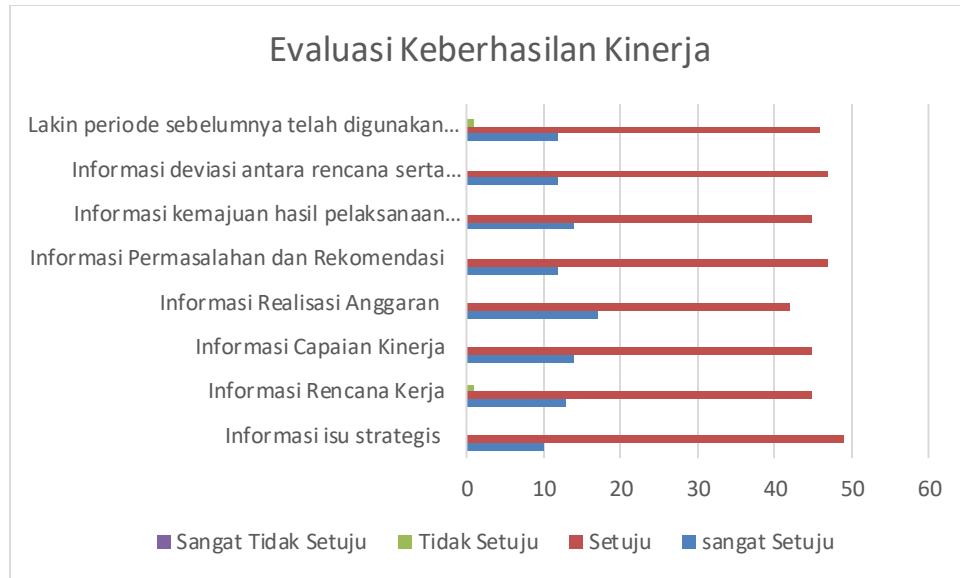
Gambar 3.6.4 Penyesuaian Aktivitas

4. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja



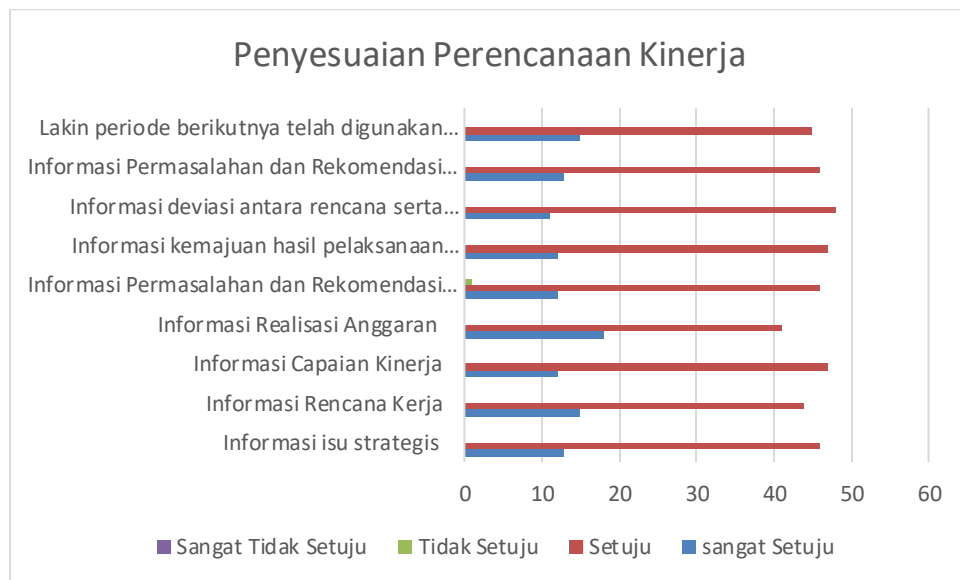
Gambar 3.6.5 Penyesuaian Anggaran

5. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja



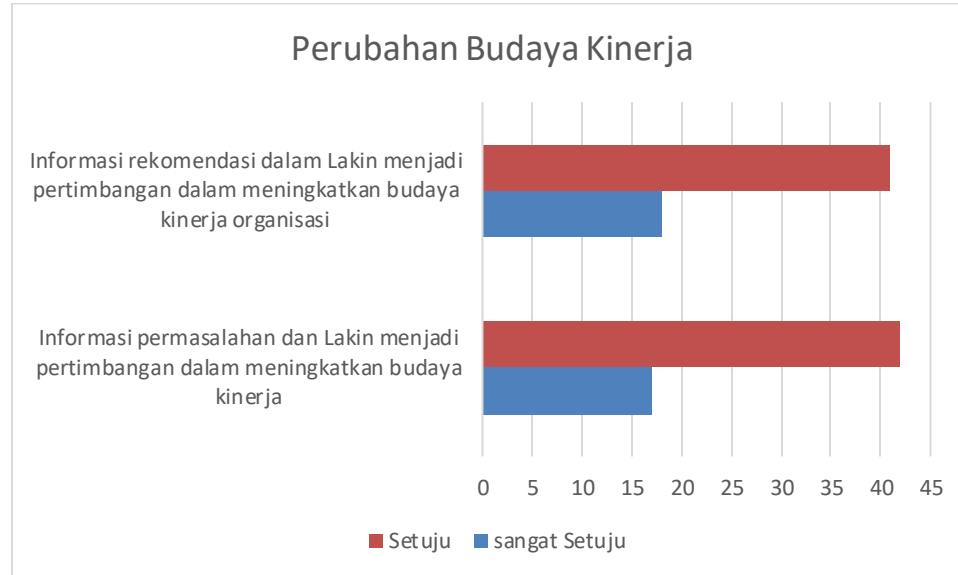
Gambar 3.6.6 Evaluasi Keberhasilan Kinerja

6. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya



Gambar 3.6.7 Penyesuaian Perencanaan Kinerja

7. Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi



Gambar 3.6.8 Perubahan Budaya Kinerja

3.7 Paket Diresmikan dan Penghargaan

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.7.1 Data Jalan Tol yang diresmikan Tahun 2024

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Nomor SK Operasi
1	Binjai - Langsa	Seksi Stabat - Tanjung Pura Segmen Kuala Bingai - Tanjung Pura	19.03	12 Januari 2024	15/KPTS/M/2024
2	Jalan Akses Tol Makassar New Port	(Tahap I dan II) sebagian bagian dari Jalan Tol Makassar Seksi IV	-	2 Februari 2024	253/KPTS/M/2024
3	Jalan Tol Jakarta-Cikampek	Jalan Akses Tol KM 1+842 Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek	-	26 April 2024	912/KPTS/M/2024
4	Indrapura Kisaran	Seksi 2 (Limapuluh - Kisaran)	32.60	26 April 2024	913/KPTS/M/2024
5	Pekanbaru - Padang	Seksi Bangkinang - Pangkalan Tahap I Segmen Bangkinang - XIII Koto Kampar	24.70	31 Mei 2024	1084/KPTS/M/2024

No	Ruas Jalan Tol	Seksi	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Nomor SK Operasi
6	Simpang Susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	-	-	19 Juni 2024	1320/KPTS/M /2024
7	Cimanggis - Cibitung	Seksi 2B (SS Cikeas - Junction Cibitung)	19.66	9 Juli 2024	1626/KPTS/M /2024
8	Cibitung - Cilincing	Seksi 1 STA 0+375	-	9 Juli 2024	1628/KPTS/M /2024
9	Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat	Seksi 3, dan Sebagian Seksi 4	45.63	9 September 2024	2373/KPTS/M /2024
10	Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo	Seksi 1 Kartasura-Purwomartani segmen Kartasura-	22.30	19 September 2024	2439/KPTS/M /2024
11	Serpong Balaraja	Seksi 1B	5.40	15 Oktober 2024	2787/KPTS/M /2024
12	STS Martadinata	-	-	30 Oktober 2024	2964/KPTS/M /2024
13	Betung - Jambi	Seksi 3 Segmen Bayung Lencir - Tempino	34.10	16 Oktober 2024	2798/KPTS/M /2024

Penghargaan tingkat nasional :

1. Pada Tahun 2024 Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan apresiasi dan terima kasih dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) atas Sinergi dan Kolaborasi Dalam Percepatan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional 2024.

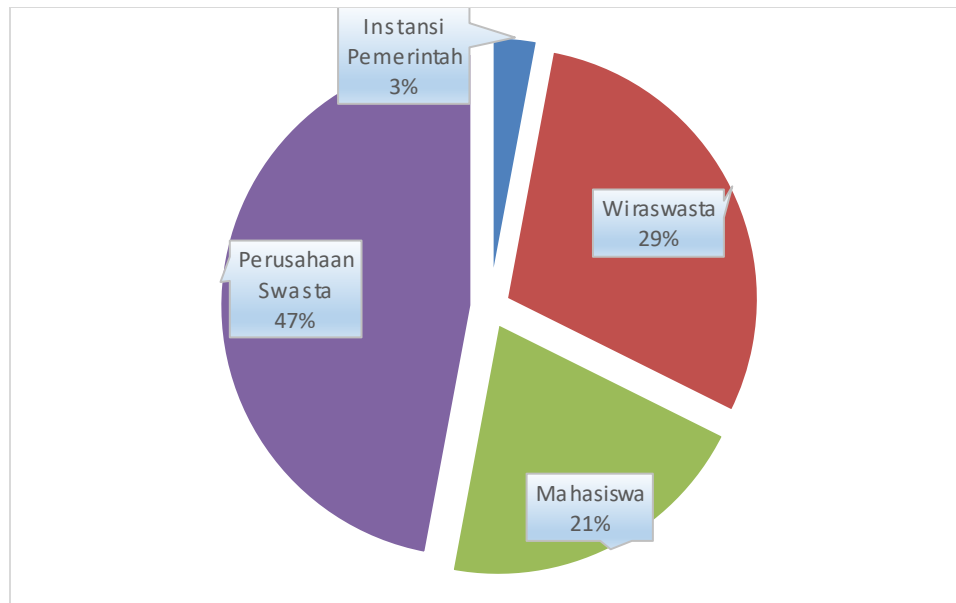


2. Pada Januari Tahun 2024, Badan pengatur Jalan Tol telah melaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Anti penyuapan (SMAP) ISO Surveillance ISO 37001:2016 untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System dari PT MSA Certification. Sertifikasi tersebut hendaknya bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPJT untuk mengembangkan sistem yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, serta menangani tindakan penyuapan baik bersifat *inbound* maupun *outbound bribery*.



3.8 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Penggunaan Pelayanan Publik

Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengatur Jalan Tol dilakukan secara terus menerus yang merupakan responden pengguna website BPJT yang mewakili individu sebagai perorangan, responden yang mewakili kelompok masyarakat serta responden yang mewakili Badan Hukum. Jumlah responden yang mewakili individu mengisi survei sebanyak 68 responden, sementara jumlah responden berasal dari kalangan swasta dalam pengisian survei sebanyak 32 responden atau (47%), dari mahasiswa sebanyak 14 responden atau (21%), dari kalangan wiraswasta sebanyak 20 orang atau (29%) dan jumlah responden yang mewakili Instansi Pemerintah berjumlah 2 responden atau (3%).



Gambar 3.8.1 SKM Penggunaan Layanan Publik

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner diperoleh nilai mutu pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol dipersepsikan Sangat Baik oleh pengguna layanan. Hal ini terlihat dari Nilai IKM yang diperoleh sebesar 88.39 (kisaran nilai 88,31 – 100,0 Sangat Baik). Jumlah nilai rata-rata per unsur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8.1 Jumlah Nilai Rata – Rata Per Unsur dari Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	Persyaratan	3.4706	B	Baik
2	Prosedur	3.4853	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.5294	B	Baik
4	Biaya/Tarif	3.4706	B	Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.5147	B	Baik
6	Kompetensi Petugas	3.5147	B	Baik
7	Perilaku Petugas	3.5735	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.4265	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3.8382	A	Sangat Baik

BAB 4

PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kegiatan dan anggaran tahun 2024 serta merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan serta menjadi acuan dan tolak ukur keberhasilan/kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pencapaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2024 terhitung cukup baik berada di rentang nilai 100% dari 4 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol, Layanan Umum, Layanan Perkantoran, Layanan Sarana Internal. Terdapat penambahan pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dari semula 108 orang menjadi 127 orang dengan anggaran DIPA Awal sebesar Rp.79.508.215.000 menjadi Rp.77.088.406.000 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,02%.

Hasil dari Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun – tahun mendatang.

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendaftarkan pegawai dalam pelatihan diklat dan workshop sesuai dalam bidangnya.
2. Kerjasama, komunikasi dan peran aktif dari pegawai dan stakeholder dalam peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
3. Peningkatan komitmen terhadap pencapaian kinerja.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan, pengelolaan data yang digunakan dalam pemantauan evaluasi capaian kinerja.

4.1.2 Faktor Pendukung Kegagalan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada tahun 2024, yaitu :

- a. Kematangan dalam perencanaan kinerja yang masih perlu ditingkatkan, hal ini dilihat dengan adanya revisi DIPA yang terjadi beberapa kali.
- b. Perencanaan target kinerja tahunan yang belum sepenuhnya selaras dengan target Perjanjian Kinerja.
- c. Proses penyiapan dokumen lelang/ dokumen addendum yang cukup lama sehingga menyebabkan beberapa paket kegiatan terhambat proses pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran.
- d. Implementasi Sistem *Multi Lane Free Flow* (MLFF) saat ini masih tertunda dan mundur dari jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini utamanya karena beberapa kondisi seperti kesiapan sistem, persetujuan/perizinan dari instansi terkait, serta kesiapan data registrasi dan identifikasi kendaraan milik Kepolisian. Saat ini BPJT sedang melaksanakan negosiasi bersama dengan PT RITS untuk dapat mempersiapkan implementasi Sistem MLFF termasuk dengan modifikasi yang perlu dilakukan. Di samping itu, juga mempersiapkan risiko yang mungkin muncul dari setiap skenario yang mungkin ditempuh oleh Pemerintah.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar lebih matang dan komprehensif agar tidak banyak perubahan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
- c. Diperlukan koordinasi dengan pihak – pihak luar terkait tindak lanjut permasalahan pembebasan lahan.
- d. Memfokuskan perencanaan, pemrograman, penganggaran pada pengadaan tanah.
- e. Melakukan analisis produktivitas konstruksi dilapangan dan memberikan rekomendasi kepada BUJT berdasarkan hasil analisis untuk mencapai target konstruksi.

Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2024 dapat menjadi masukan bagi peningkatan kinerja ditahun yang akan mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi
3. Data Kaki Laporan Kinerja
4. BA Kesepakatan Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : APRI ARTOTO
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	85,02 %	100,00 %
	Parameter <i>Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi</i>	240,13 Km	418,85 Km
	Rincian Output		
	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00 %	100,00 %
	Rincian Output		
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan
EBB 951 Layanan Sarana Internal	54,00 Unit	57,00 Unit	

Kegiatan :

1. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol
 2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
- Total Anggaran

	Anggaran
Rp	61.701.948.000
Rp	17.806.267.000
Rp	79.508.215.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian



Jakarta, 5 Januari 2024
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol,

Apri Artoto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							79.508.215	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						61.701.948	
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					61.701.948	
		ABF Pengaturan, Pengusahaan, 010 Pengawasan Jalan Tol	1,00	Rekomendasi Kebijakan			61.701.948	
					Sekretariat Pengatur Jalan Tol		61.701.948	
				402	Manajemen Pengendalian		61.701.948	
					Bagian Umum			
					AA Penyusunan, Perencanaan Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA.2024	Jakarta Selatan	969.336	
					AB Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Jakarta Selatan	1.766.978	
					AC Penataan Arsip	Jakarta Selatan	705.458	
					AD Pemeliharaan Gedung	Jakarta Selatan	1.222.000	
					AE Manajemen Bidang Ke Tata Usaha	Jakarta Selatan	2.595.510	
					AF Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	1.130.849	
					Bidang PPA			
					BA Monitoring Pemantauan Pemeliharaan Aset, Layanan Jalan Tol, dan Penyesuaian Tarif Jalan Tol	Jakarta Selatan	5.897.261	
					BB Kajian Integrasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	2.965.047	
					BC Bantuan Teknis Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Aset Jalan Tol	Jakarta Selatan	5.882.068	
					Bidang SILJT			
					CA Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Self Assessment Aspek Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Jakarta Selatan	5.455.000	
					CB Project Management Office Pengelolaan Data Informasi dan Fasilitasi Layanan Operasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	5.740.000	
					CC Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol	Jakarta Selatan	6.262.000	
					CD Pengelolaan Data dan Pemantauan Layanan Jalan Tol	Jakarta Selatan	6.404.822	
					Bidang Investasi			
					DA Bantuan Dukungan Persiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	7.800.000	
					DB Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	2.905.619	
					DC Kajian Ability-To-Pay (ATP) dan Willingness-To-Pay (WTP) Pada Beberapa Ruas Jalan Tol	Jakarta Selatan	4.000.000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME		KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kualitas	Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						17.806.267	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						17.806.267	
		EBA 962 Layanan Umum	1,00	Layanan				1.910.414	
						Sekretariat Pengatur Jalan Tol		1.910.414	
					051	Pengelolaan Perbendaharaan		1.910.414	
						AH Administrasi Kegiatan	Jakarta Selatan	1.910.414	
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan				14.809.843	
						Sekretariat Pengatur Jalan Tol		14.809.843	
					001	Gaji dan Tunjangan		10.019.951	
						A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan	3.747.462	
						FA Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan	6.272.489	
					002	Operasional dan pemeliharaan Kantor		4.789.892	
						FB Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Jakarta Selatan	2.219.272	
						FC Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	Jakarta Selatan	2.570.620	
		EBB 951 Layanan Sarana Internal	57,00	Unit				1.086.010	
			57,00	Unit		Sekretariat Pengatur Jalan Tol		1.086.010	
			54,00	Unit	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1.025.010	
			54,00	Unit		GA Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi	Jakarta Selatan	1.025.010	
			3,00	Unit	053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		61.000	
			3,00	Unit		HA Fasilitas Perkantoran	Jakarta Selatan	61.000	

Perjanjian Kinerja Revisi



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : APRI ARTOTO
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGATUR JALAN TOL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

APRI ARTOTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						77,088,406	Total Anggaran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						59,017,553	
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					59,017,553	
	ABF.010.Pengaturan Pengusahaan Pengawasan Jalan Tol	1.00 Rekomendasi Kebijakan				59,017,553	
		1.00 Rekomendasi Kebijakan	PROVINSI DKI JAKARTA			59,017,553	
		1.00 Rekomendasi Kebijakan	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL			59,017,553	
			402 Manajemen Pengendalian			59,017,553	
				AA PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TA.2024	KOTA JAKARTA SELATAN	1,369,067	
				AB PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM	KOTA JAKARTA SELATAN	1,121,525	
				AC PENATAAN ARSIP	KOTA JAKARTA SELATAN	1,080,000	
				AD PEMELIHARAAN GEDUNG	KOTA JAKARTA SELATAN	1,957,744	
				AE MANAJEMEN BIDANG KE TATA USAHAAN	KOTA JAKARTA SELATAN	2,090,995	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				AF MONITORING DAN PENAGIHAN PIUTANG PENDANAAN PENGUSAHAAN JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	922,738	
				AG PEMELIHARAAN DATABASE PENCATATAN ASET KONSESI JASA BPJT	KOTA JAKARTA SELATAN	1,304,548	
				BA MONITORING PEMANTAUAN PEMELIHARAAN ASET LAYANAN JALAN TOL DAN PENYESUAIAN TARIF JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	5,235,451	
				BB KAJIAN INTEGRASI JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	2,609,880	
				BC BANTUAN TEKNIS KEGIATAN PEMANTAUAN PEMELIHARAAN ASET JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	5,175,928	
				BD PANEL AHLI DALAM RANGKA DUKUNGAN PENERAPAN MULTI LANE FREE FLOW MLFF	KOTA JAKARTA SELATAN	771,775	
				BE KEGIATAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MULTI LANE FREE FLOW MLFF	KOTA JAKARTA SELATAN	605,938	
				CA MONITORING DAN EVALUASI PEMENUHAN SELF ASSESSMENT ASPEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	4,351,020	
				CB PROJECT MANAGEMENT OFFICE PENGELOLAAN DATA INFORMASI DAN FASILITASI LAYANAN OPERASI JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	5,018,055	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				CC PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	5,259,575	
				CD PENGELOLAAN DATA DAN PEMANTAUAN LAYANAN JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	7,027,005	
				DA BANTUAN DUKUNGAN PERSIAPAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	6,303,481	
				DB PERSIAPAN DAN PENGAWASAN INVESTASI JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	3,602,386	
				DC KAJIAN ABILITY-TO-PAY ATP DAN WILLINGNESS-TO-PAY WTP PADA BEBERAPA RUAS JALAN TOL	KOTA JAKARTA SELATAN	3,210,442	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						18,070,853	
	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					18,070,853	
	EBA.962.Layanan Umum	1.00 Layanan				1,832,614	
		1.00 Layanan	PROVINSI DKI JAKARTA			1,832,614	
		1.00 Layanan	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL			1,832,614	
			055 Pengelolaan perbendaharaan			1,832,614	
				AH Administrasi Kegiatan	KOTA JAKARTA SELATAN	1,832,614	
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				14,884,229	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1.00 Layanan	PROVINSI DKI JAKARTA			14,884,229	
		1.00 Layanan	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL			14,884,229	
			001 Gaji dan Tunjangan			10,019,951	
				A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	KOTA JAKARTA PUSAT	3,747,462	
				FA Pembayaran Gaji dan Tunjangan	DKI JAKARTA	6,272,489	
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,864,278	
				FB Operasional Perkantoran dan Pimpinan	KOTA JAKARTA PUSAT	2,281,173	
				FC Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	KOTA JAKARTA PUSAT	2,583,105	
	EBB.951.Layanan Sarana Internal	56.00 Unit				1,354,010	
		56.00 Unit	PROVINSI DKI JAKARTA			1,354,010	
		56.00 Unit	SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL			1,354,010	
		43.00 Unit	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1,110,941	
		43.00 Unit		GA Pengadaan Alat Pengolah Data Pencetak Data dan Komunikasi	KOTA JAKARTA PUSAT	1,110,941	
		13.00 Unit	053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			243,069	
		13.00 Unit		HA Fasilitas Perkantoran	KOTA JAKARTA SELATAN	243,069	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		BASELINE 2023	TARGET 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional		IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
		IKK : Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	85.02 %	100.00 %
	Parameter :	Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	236.80 KM	194.88 KM
	ABF.010	Pengaturan Pengusahaan Pengawasan Jalan Tol	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
		IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100.00 %	100.00 %
	Parameter :	Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	100.00 %	100.00 %
	EBA.962	Layanan Umum	-	1.00 Layanan
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	54.00 Unit	56.00 Unit

Kegiatan:

1. Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran:**Anggaran:**

Rp. 59,017,553,000
Rp. 18,070,853,000
Rp. 77,088,406,000

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS
BADAN PENGATUR JALAN TOL

APRI ARTOTO

Data Kaki Laporan Kinerja

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ) TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(7)/100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
						92.02	100.00	100.00				77,088,406	77,088,406	70,162,158	91.02	91.02	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											59,017,553	59,017,553	53,546,338	90.73	90.73	
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional										59,017,553	59,017,553	53,546,338	90.73	90.73	
		ABF Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan	100.00	100.00	100.00				59,017,553	59,017,553	53,546,338	90.73	90.73	
									Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol								
									Bagian Umum			9,846,617	9,846,617	8,188,724	83.16	83.16	
									052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			9,846,617	9,846,617	8,188,724	83.16	83.16	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	AA	Penyusunan, Perencanaan Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA.2024	Jakarta Selatan	1,369,067	1,369,067	1,181,169	86.28	86.28	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	AB	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Jakarta Selatan	1,121,525	1,121,525	890,816	79.43	79.43	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	AC	Penataan Arsip	Jakarta Selatan	1,080,000	1,080,000	1,051,854	97.39	97.39	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	AD	Pemeliharaan Gedung	Jakarta Selatan	1,957,744	1,957,744	1,955,034	99.86	99.86	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	AE	Manajemen Bidang Ke Tata Usahan	Jakarta Selatan	2,090,995	2,090,995	1,488,791	71.20	71.20	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	AF	Monitoring dan Pengagahan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	922,738	922,738	552,181	59.84	59.84	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	AG	Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Konsesi Jasa BPJT	Jakarta Selatan	1,304,548	1,304,548	1,066,879	81.93	81.93	
									Bidang PPA								
									052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			14,398,972	14,398,972	12,253,268	85.10	85.10	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	BA	Monitoring Pemantauan Pemeliharaan Aset, Layanan Jalan Tol, Dan Penyesuaian Tarif Jalan Tol	Jakarta Selatan	5,235,451	5,235,451	4,550,159	86.91	86.91	
			1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00	100.00	100.00	BB	Kajian Integrasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	2,609,880	2,609,880	2,592,128	99.32	99.32	
			1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00	100.00	100.00	BC	Bantuan Teknis Kegiatan Pemantauan Pemeliharaan Aset Jalan Tol	Jakarta Selatan	5,175,928	5,175,928	4,747,387	91.72	91.72	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	BD	Panel Ahli Dalam Rangka Dukungan Penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF)	Jakarta Selatan	771,775	771,775	105,894	13.72	13.72	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	BE	Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF)	Jakarta Selatan	605,938	605,938	257,700	42.53	42.53	
									Bidang SILJT								
									052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			21,655,655	21,655,655	20,798,001	96.04	96.04	
			1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00	100.00	100.00	CA	Monitoring Dan Evaluasi Pemenuhan Self Assessment Aspek Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Jakarta Selatan	4,351,020	4,351,020	4,351,019	100.00	100.00	
			1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00	100.00	100.00	CB	Project Management Office Pengelolaan Data Informasi Dan Fasilitas Layanan Operasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	5,018,055	5,018,055	5,018,055	100.00	100.00	
			1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00	100.00	100.00	CC	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Jalan Tol	Jakarta Selatan	5,259,575	5,259,575	5,259,574	100.00	100.00	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	CD	Pengelolaan Data Dan Pemantauan Layanan Jalan Tol	Jakarta Selatan	7,027,005	7,027,005	6,169,353	87.79	87.79	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
									Bidang Investasi								
									052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			13,116,309	13,116,309	12,306,345	93.82	93.82	
			1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00	100.00	100.00	DA Bantuan Dukungan Persiapan Dan Pengawasan Perusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan		6,303,481	6,303,481	6,264,766	99.39	99.39	
			1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	100.00	100.00	DB Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol	Jakarta Selatan		3,602,386	3,602,386	2,831,137	78.59	78.59	
			1.00 Paket	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00	100.00	100.00	DC Kajian Ability-To-Pay (ATP) Dan Willingness-To-Pay (WTP) Pada Beberapa Ruas Jalan Tol	Jakarta Selatan		3,210,442	3,210,442	3,210,442	100.00	100.00	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											18,070,853	18,070,853	16,615,820	91.95	91.95	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										18,070,853	18,070,853	16,615,820	91.95	91.95	
		EBA 962 Layanan Umum	1.00 Layanan	1.00 Layanan	1.00 Layanan	88.80	100.00	100.00				1,832,614	1,832,614	1,627,390	88.80	88.80	
									005 Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol			1,832,614	1,832,614	1,627,390	88.80	88.80	
									005 Pengelolaan Perbendaharaan			1,832,614	1,832,614	1,627,390	88.80	88.80	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	88.80	100.00	100.00	AH Administrasi Kegiatan	Jakarta Selatan		1,832,614	1,832,614	1,627,390	88.80	88.80	
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan	1.00 Layanan	93.56	100.00	100.00				14,884,229	14,884,229	13,655,898	91.75	91.75	
									001 Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol			14,884,229	14,884,229	13,655,898	91.75	91.75	
									001 Gaji dan Tunjangan			10,019,951	10,019,951	9,654,149	96.35	96.35	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00	100.00	100.00	A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan		3,747,462	3,747,462	3,478,895	92.83	92.83	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	98.45	100.00	100.00	FA Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan		6,272,489	6,272,489	6,175,254	98.45	98.45	
									002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,864,278	4,864,278	4,001,749	82.27	82.27	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	7.47 Bulan	62.21	62.21	62.21	FB Operasional Perkantoran dan Pempinan	Jakarta Selatan		2,281,173	2,281,173	1,419,068	62.21	62.21	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00	100.00	100.00	FC Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	Jakarta Selatan		2,583,105	2,583,105	2,582,681	99.98	99.98	
		EBB 951 Layanan Sarana Internal	56.00 Unit	56.00 Unit	56 Unit	100.00	100.00	100.00				1,354,010	1,354,010	1,332,532	99.68	99.68	
									001 Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol			1,354,010	1,354,010	1,332,532	99.68	99.68	
			56.00 Unit	56.00 Unit	56 Unit	100.00	100.00	100.00	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1,110,941	1,110,941	1,107,332	99.68	99.68	
			56.00 Unit	56.00 Unit	56 Unit	100.00	100.00	100.00	GA Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi	Jakarta Selatan		1,110,941	1,110,941	1,107,332	99.68	99.68	
									052 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			243,069	243,069	225,200	92.65	92.65	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00	100.00	100	HA Fasilitas Perkantoran	Jakarta Selatan		243,069	243,069	225,200	92.65	92.65	

BA Kesepakatan Capaian Kinerja

**BERITA ACARA TARGET KINERJA REVISI UNIT KERJA /BALAI TA. 2024
DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA**

NO	PARAMETER KEBERHASILAN	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET PK AWAL	TARGET PK REVISI	REALISASI	DEVIASI THD TARGET PK REVISI	KETERANGAN <i>*apabila terdapat perbedaan antara PK Awal dan PK Revisi</i>
11	SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL							
	Kegiatan : Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol							
	IKK : Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan							
11.1	Panjang Jalan Tol yang beroperasi	km	236.80	418.85	194.88	184.72	-10.15	Berikut capaian ruas jalan tol yang beroperasi pada tahun 2024 : 1. Indrapura - Kisaran 2. Pekanbaru - Padang 3. Cimanggis - Cibitung 4. Cibitung - Cilincing 5. Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Prapat (Seksi 3 dan sebagian seksi 4) 6. Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo 7. Betung (Sp Kayu) - Tempino - Jambi 8. Serpong - Balaraja Ruas yang belum beroperasi dikarenakan dalam proses Uji Lain Fungsi: 1. Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Prapat (sebagian Seksi 2 Kuala Tj - Indrapura)
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga							
	IKK : Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan							
11.2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	100	100		

Mengetahui :	
Nama	: Dwi Astuti S.Sos
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Tanda tangan :	